

# Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Mandiri



Sumber Gambar : Pinterest.com

Periode Tahun 2016

## DAFTAR ISI

	Hal
I. Pendahuluan.....	1
II. Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan.....	1
III. Struktur Tata Kelola Perusahaan.....	3
IV. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.....	5
V. Struktur Organisasi.....	7
VI. Dewan Komisaris.....	8
VII. Direksi.....	13
VIII. Dewan Pengawas Syariah.....	17
IX. Komite Komite.....	23
X. Kepemilikan Saham dalam Bank.....	39
XI. <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG.....	39
XII. Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya.....	43
XIII. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima.....	44
XIV. Remunerasi dan Fasilitas Lain.....	47
XV. <i>Buy Back Share</i> dan <i>Buy Back Obligation</i> .....	50
XVI. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.....	51
XVII. Satuan Kerja Kepatuhan .....	52
XVIII. Penanganan Benturan Kepentingan.....	59
XIX. <i>Code of Conduct</i> .....	61
XX. Pelaksanan Audit Intern.....	63
XXI. <i>Whistleblowing System</i> .....	66
XXII. Permasalahan Hukum Tahun 2016.....	68
XXIII. Daftar Konsultan, Penasihat Atau Yang Diepersamakan dengan Itu.....	69

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

### PT BANK SYARIAH MANDIRI 2016

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan tools untuk menumbuhkan integritas perusahaan dan menjaga kepercayaan dari *stakeholders*. Bank Syariah Mandiri (BSM) berkomitmen untuk terus mempraktekkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan BSM sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia.

#### I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) maka tidak lepas dari bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG menjadi mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah puluhan tahun bertahan namun harus runtuh akibat praktek *bad corporate governance* yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Berkaca dari pelajaran yang ada BSM menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan praktik GCG sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan BSM untuk terus berupaya menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG.

Implementasi pelaksanaan GCG di BSM mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).

#### II. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

BSM menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil positif dari implementasi GCG merupakan proses panjang yang berkesinambungan. Oleh karena itu BSM menginternalisasi pelaksanaan prinsip prinsip GCG kedalam sistem dan prosedur kerja serta perilaku jajaran BSM sehingga prinsip prinsip GCG benar benar menjadi sebuah budaya di BSM. Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahaan.

##### 1. Kebijakan Dasar GCG

BSM telah melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan kebijakan operasional yang berlaku. BSM menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan BSM. Sebagai dasar pedoman, BSM telah memiliki aturan internal terkait GCG yang di tuangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan

No. registrasi KBP/01-2016 yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Sinergi Dengan Perusahaan Induk

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka BSM selaku perusahaan anak dari Bank Mandiri turut menjadi bagian dalam sinergi pelaksanaan tata kelola yang baik. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan perusahaan induk jajaran BSM menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan menyampaikan kewajiban laporan Tata Kelola Terintegrasi ke Bank Mandiri secara periodic.

3. Pemingkatan GCG

BSM mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI adalah program riset dan pemingkatan pelaksanaan GCG di Indonesia yang bertujuan mendorong perusahaan meningkatkan kualitas *governance* melalui perbaikan yang berkelanjutan.

Keikutsertaan BSM dalam program CGPI bertujuan untuk:

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai pelaksanaan GCG yang optimal.
- b. Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen BSM kepada *stakeholders* atas pelaksanaan GCG.

Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah:

- a. Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
- b. Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
- c. Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam mengimplementasikan GCG
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

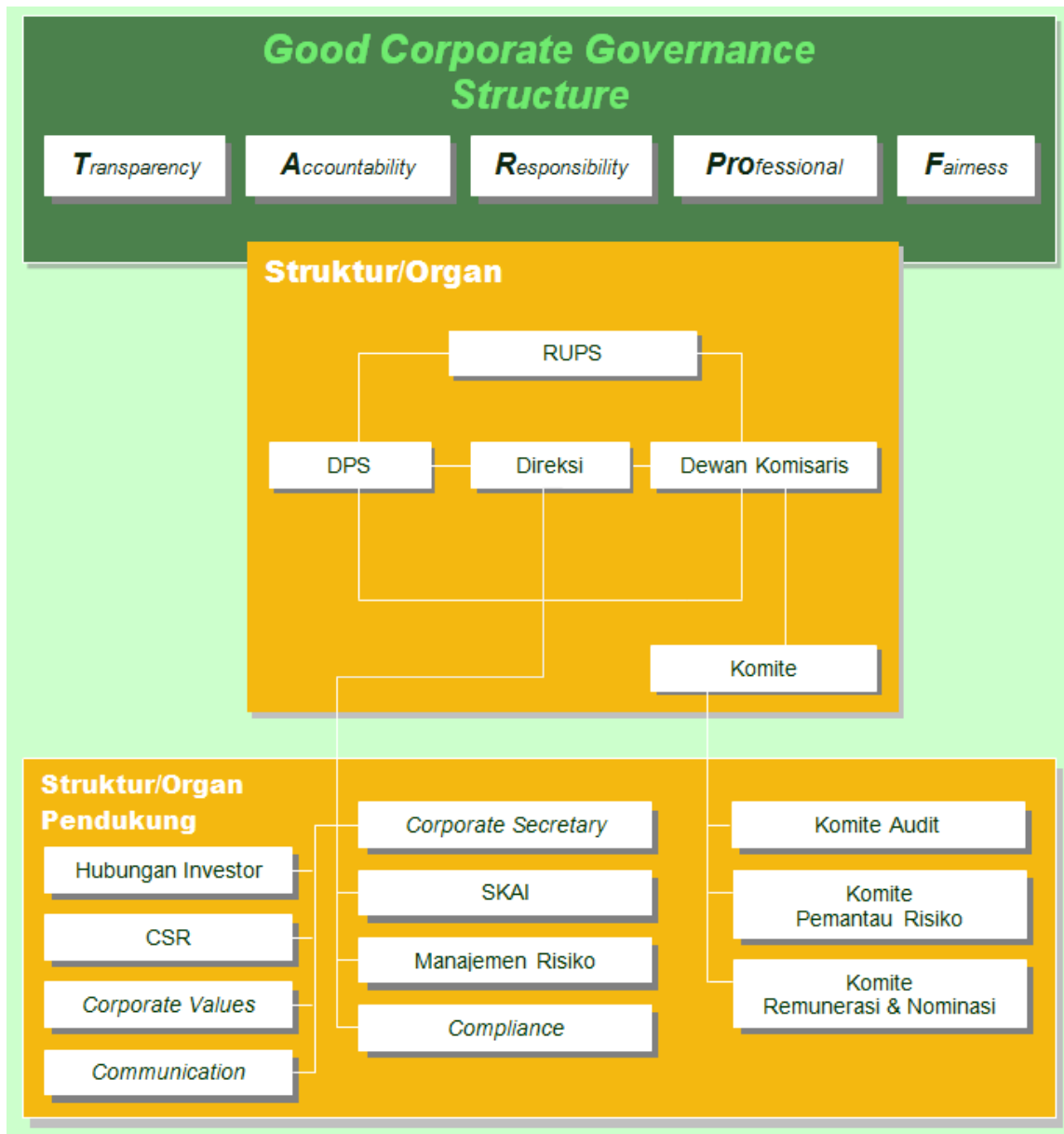
BSM telah mengikuti program CGPI sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. Program CGPI menilai pelaksanaan GCG periode tahun setelah berjalan. Selama lima periode (periode penilaian tahun 2011-2015) keikutsertaan BSM dalam program CGPI, BSM mendapatkan predikat perusahaan **"The Most Trusted Companies"**. Pencapaian peringkat "The Most Trusted Companies" yang BSM dapat secara berturut-turut menunjukkan komitmen BSM dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan.



### III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola perusahaan BSM telah merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Governance BSM



Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk terdiri dari:

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Remunerasi & Nominasi

Komite komite yang dibentuk beranggotakan Dewan Komisaris sendiri dan pihak pihak independen dan profesional dibidangnya.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:

- a. Internal Audit
- b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
- c. Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

**IV. MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Untuk mendapatkan manfaat dari implementasi GCG yang optimal, maka implementasi GCG harus dilakukan secara terarah, terencana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan. BSM berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tahapan Implementasi GCG



BSM mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui:

1. Komitmen GCG

Tahapan awal dalam implementasi GCG adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam implementasi GCG. Bentuk implementasi komitmen GCG bersama dimulai membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi GCG seperti; Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, *Code of Conduct*, dan GCG *charter*.

2. Struktur GCG

BSM melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Mekanisme GCG

Prinsip-prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan prinsip-prinsip GCG benar benar terlaksana dalam *governance process*.

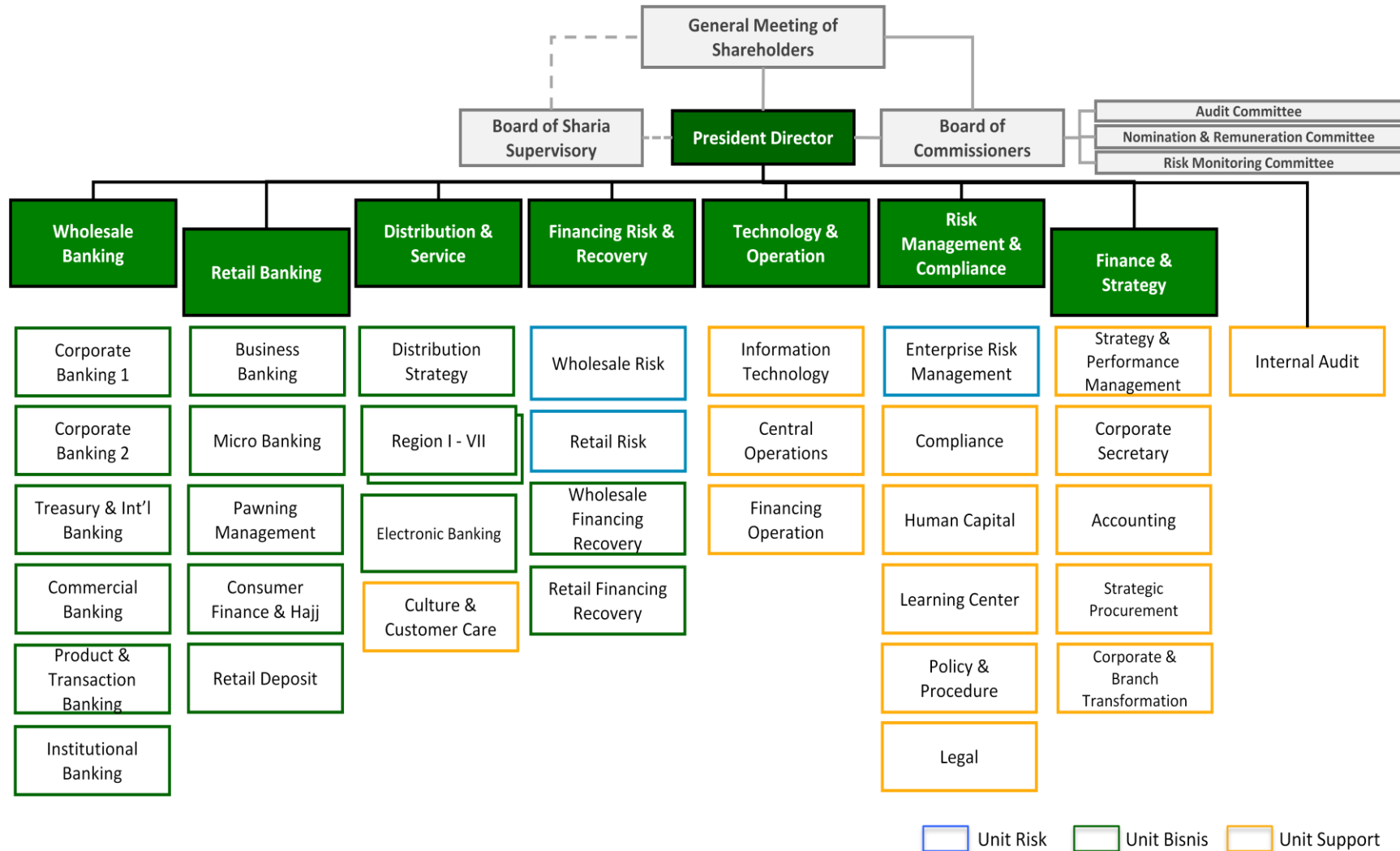
4. Sosialisasi dan evaluasi

Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah mensosialisasikannya kepada jajaran perusahaan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan GCG dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana implementasi GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan implementasi GCG kedepan secara berkelanjutan.

5. Keberlanjutan

Keberhasilan implementasi GCG tidak didapatkan secara instan, konsistensi dan keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip GCG menjadi kunci penting dalam implementasi GCG. Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki implementasi GCG yang telah berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam implementasi GCG juga menjadi kunci dalam keberlanjutan GCG.

V. STRUKTUR ORGANISASI



## VI. DEWAN KOMISARIS

Sesuai Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan PT Bank Syariah Mandiri (Bank) melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.
- c. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
- d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar;
- f. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
- g. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- h. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- i. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  - j. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
2. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris tahun 2016, sebagai berikut:

Nama	Riwayat Hidup Singkat
Ventje Rahardjo <b>Komisaris Utama</b>	Periode Jabatan: 07 Mei 2014 – sekarang Warga Negara Indonesia, Lahir tanggal 4 November 1954. Lulusan Universitas Indonesia bidang Ekonomi tahun 1980 dan Master Ekonomi dari The University of New England, Australia pada tahun 1986. Pengalaman profesional beliau diawali di Bapindo dengan jabatan Analis dan General Manager (1981-1999), kemudian sebagai Anggota Tim Merger hingga Direktur Commercial Banking Bank Mandiri (1999-2005), Direktur Retail & Micro Banking BRI (2005-2006), Senior Advisor Batasa Tazkia Consulting (2006-2007), Managing Director SME Commercial & Syariah Banking Bank International Indonesia (2007-2008), dan CEO BRI Syariah (2008-2011). Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri, seperti; Sertifikasi Manajemen Risiko di Amsterdam (2004), SESPIBANK di Jakarta (1998), Advance Course on Banking (1983), Advance Management Programme for Overseas Banker (1993), Top Management Programme di Manila (1995), 3Rd Annual Senior Management Risk Summit (2012) di Singapore, Training Leading Change and Organizational Renawal (2013) di Boston dan Training Berkeley Executive Leadership Program di Berkeley – California (2015).
Ramzi A. Zuhdi <b>Komisaris Independen</b>	Periode Jabatan: 29 Juni 2010 – sekarang Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, 5 Mei 1952.

Nama	Riwayat Hidup Singkat
	<p>Lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 1979 dan Meraih Master Degree di Iowa State University tahun 1989. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat sebagai Direktur DPbS Bank Indonesia dan Direktur Keuangan PT Mekar Prana Indah, beliau saat ini juga menjadi <i>asesor Risk Management</i> di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Indonesia dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia.</p> <p><i>Training</i> yang pernah diikuti antara lain <i>Islamic Banking, Program Eksekutif, Leadership Program, dan Risk Management Certification Refreshment Program, Indonesia International Conference on Islamic Finance</i>, dan sebagainya.</p>
<p>Agus Fuad <b>Komisaris</b></p>	<p>Periode Jabatan: 29 Mei 2013 – sekarang Warga Negara Indonesia. Lahir di Sragen, 09 Agustus 1959.</p> <p>Alumnus Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 1994. Meraih gelar Magister Management tahun 1999 di Universitas Airlangga. Dipercaya menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, beliau sebelumnya menjabat sebagai <i>Group Head Distribution Network I</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Beliau juga pernah menjabat sebagai <i>Group Head Distribution Network II, Group Head Business Banking II, Regional Manager Wilayah X – Makassar, Deputy Regional Manager Wilayah I – Medan, Area Manager Banjarmasin, Branch Manager Malang Merdeka.</i></p> <p><i>Training</i> yang diikuti antara lain <i>Executive Distance Learning on Islamic Banking Training, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, Coaching for Excellence Executive, Workshop Six Sigma Champion, The Looking Glass Experience, Managing Customer Relationship for Profit, Leading Strategic Growth &amp; Change</i>, dan sebagainya.</p>
<p>Bambang Widiyanto <b>Komisaris Independen</b></p>	<p>Periode Jabatan: 29 Mei 2013 – sekarang. Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 27 November 1959.</p> <p>Alumnus bidang Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1985, Meraih Gelar <i>Master of Art (MA)</i> bidang <i>Computer Science</i> tahun 1990 di Boston University-Boston USA dan bidang Ilmu Ekonomi tahun 1993 di Northeastern University-Boston USA, serta Meraih Gelar <i>Philosophiae Doctor (Ph.D)</i> di bidang Ilmu Ekonomi tahun 1995 di Northeastern University-Boston USA. Selain menjadi Anggota Dewan Komisaris BSM, saat ini beliau menjabat sebagai <i>Deputi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Pengajar pada program Magister Ilmu</i></p>

Nama	Riwayat Hidup Singkat
	Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pengajar pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  <i>Training</i> yang diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, <i>Executive Distance Learning on Islamic Banking Training</i> , dan sebagainya.
Zulkifli Djaelani <b>Komisaris Independen</b>	Periode Jabatan: 07 Mei 2014 – sekarang. Warga Negara Indonesia. Lahir di Tembilahan (Riau), 08 Februari 1948.  Alumnus jurusan Akuntansi (s.d. Tingkat V), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1975. Sebelum menjabat sebagai Komisaris beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Direktur Operasi & Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Niaga, Pemimpin Wilayah Jawa Tengah & DIY dan Wilayah Jakarta Bank Niaga, Pemimpin Cabang di Solo dan Jakarta Bank Niaga.  <i>Training</i> yang diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, <i>Executive Distance Learning on Islamic Banking Training</i> , <i>IIA International Conference</i> , dan sebagainya.

### 3. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris.

Sampai dengan 31 Desember 2016, Dewan Komisaris tidak memiliki saham baik di BSM, Bank maupun Perusahaan lainnya.

Jumlah anggota Dewan Komisaris BSM saat ini adalah 5 (lima) orang dengan 3 (tiga) orang diantaranya atau 60% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

#### Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Saham Pada BSM	Saham Pada Perusahaan Lain
Ventje Rahardjo	Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Ramzi A. Zuhdi	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Agus Fuad	Komisaris	Nihil	Nihil
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Zulkifli Djaelani	Komisaris Independen	Nihil	Nihil

Seluruh Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi atau hubungan

keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi.

#### 4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan Rangkap Jabatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bp. Ventje Rahardjo, merangkap sebagai SEVP Bank Mandiri;
- b. Bp. Bambang Widianto, merangkap sebagai Deputi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.

#### 5. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *good corporate governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan Komisaris didukung oleh Komite-Komite penunjang antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan dalam forum formal seperti Rapat ataupun informal. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir), Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab), dan Rapat Komite-Komite. Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 101 (seratus satu) kali atau sebesar >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Adapun pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian target RBB Tahun 2016, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi, strategi/*action plan* yang akan dilakukan, dan sebagainya.

##### a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir)

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau Direktur Bidang, dengan agenda realisasi pencapaian rencana bisnis bank bulanan, *issue-issue* terkini Bank, inisiatif strategis Bank seperti *corporate plan*, *core banking system*, dan lainnya.

##### b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab)

Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan agenda kinerja Bank, *issue-issue* terkini Bank, inisiatif strategis Bank, kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan usaha Bank, dsb.

## c. Rapat Komite-Komite

Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Selama tahun 2016, jumlah Rapat yang telah dilakukan Dewan Komisaris sebanyak 101 (seratus satu) kali rapat. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris:

**Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris**

No.	Nama Rapat	Total Rapat	Dewan Komisaris				
			Ventje Rahardjo	Ramzi A. Zuhdi	Agus Fuad	Bambang Widiyanto *)	Zulkifli Djaelani
1	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)	12	12	11	12	9	12
2	Rapat Komite Audit	20	20	20	19	12	20
3	Rapat Komite Pemantau Risiko	59	59	58	58	37	59
4	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	10	10	10	10	9	10
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>67</b>	<b>101</b>
Catatan:		*) Tidak Merangkap sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko					

**VII. DIREKSI**

## 1. Susunan Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi BSM terdiri dari 6 (enam) orang yaitu seorang sebagai Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur, yang diangkat berdasarkan RUPS. Penunjukan Direksi telah melalui mekanisme RUPS dan *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi secara kolektif telah memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan, dan terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.

**Susunan Direksi (1 Januari 2016 – 9 September 2016)**

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	Periode Pengangkatan	Lulus Fit & Proper Test
1.	Agus Sudiarto	Direktur Utama	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-84/D03/2014, 12 September 2014
2.	Agus Dwi Handaya	Direktur	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-85/D-03/2014 tgl.12 Sept 2014

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	Periode Pengangkatan	Lulus Fit & Proper Test
3.	Fahmi Ridho	Direktur	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-99/D03/2014, 10 Oktober 2014
4.	Putu Rahwidhiyasa	Direktur	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
5.	Choirul Anwar	Direktur	Akta No. 30, RUPS tanggal 1 April 2015	April 2015 s.d. 1 April 2018	Kep-49/D-03/2015, 24 Agustus 2015
6.	Edwin Dwidjajanto	Direktur	Akta No. 30, RUPS tanggal 1 April 2015	April 2015 s.d. 1 April 2018	Kep-50/D-03/2015, 24 Agustus 2015
7.	Kusman Yandi	Direktur	Akta No. 30, RUPS tanggal 1 April 2015	April 2015 s.d. 1 April 2018	Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015

Bapak Agus Dwi Handaya mengundurkan diri pada tanggal 5 Agustus 2016 dan disetujui pada RUPS pada tanggal 9 September 2016. Dengan demikian susunan anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Susunan Direksi (9 September 2016 – 31 Desember 2016)

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	Periode Pengangkatan	Lulus Fit & Proper Test
1.	Agus Sudiarto	Direktur Utama	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-84/D03/2014, 12 September 2014
2.	Fahmi Ridho	Direktur	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-99/D03/2014, 10 Oktober 2014
3.	Putu Rahwidhiyasa	Direktur	Akta No. 02, RUPS tanggal 7 Mei 2014	Mei 2014 s.d. Mei 2017	Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
4.	Choirul Anwar	Direktur	Akta No. 30, RUPS tanggal 1 April 2015	April 2015 s.d. 1 April 2018	Kep-49/D-03/2015, 24 Agustus 2015
5.	Edwin Dwidjajanto	Direktur	Akta No. 30, RUPS tanggal 1 April 2015	April 2015 s.d. 1 April 2018	Kep-50/D-03/2015, 24 Agustus 2015
6.	Kusman Yandi	Direktur	Akta No. 30, RUPS tanggal 1 April 2015	April 2015 s.d. 1 April 2018	Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015

#### 2. Riwayat Hidup Singkat Anggota Direksi

Nama	Riwayat Hidup Singkat
Agus Sudiarto <b>Direktur Utama</b>	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 17 September 1964. Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tahun 1988. Pascasarjana Universitas Indonesia, Jurusan Risk Management, tahun 2004.

Nama	Riwayat Hidup Singkat
	<b>Perjalanan karir:</b> Group Head Special Asset Management, Bank Mandiri Group Head Assets Management, Bank Mandiri PJ GH Assets Management, Bank Mandiri
Agus Dwi Handaya <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia Lahir di Medan, 17 Agustus 1970. Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara – Medan. <b>Perjalanan karir:</b> Group Head Strategy & Performance, Bank Mandiri Pj. Group Head Strategy & Performance, Bank Mandiri Departemen Head Strategy & Financial Analysis, Bank Mandiri
Fahmi Ridho <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia. Lahir Palembang, 22 September 1968. Alumnus Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada, tahun 1989. Meraih gelar Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, tahun 1996. <b>Perjalanan karir:</b> Executive JM-TI PT Pegadaian Chief IT & Business Process PT Bank BRISyariah Senior Project Manager VP PT Bank BNI (Persero) Tbk
Putu Rahwidhiyasa <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 13 September 1964. Alumnus Fakultas Pertanian, Jurusan Agronomi, Institut Pertanian Bogor, tahun 1986, dan Meraih gelar MBA tahun 1995, dari University of Illinois, USA. <b>Perjalanan karir:</b> Transformasi & Budaya Kerja Division Head, Bank Syariah Mandiri Transformasi Division Head, Bank Syariah Mandiri Pengembangan Gadai Emas Division Head, Bank Syariah Mandiri
Choirul Anwar <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia. Lahir di Surabaya 21 Oktober 1964. Alumnus Fakultas Pertanian, Jurusan Mekanisasi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tahun 1987, dan meraih gelar MBA tahun 1996 dari University of Arkansas, USA. <b>Perjalanan karir:</b> Retail Risk Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Risk Group Head (Pj) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Credit Cycle Analytics & Risk Solution, Dept. Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Edwin Dwidjajanto <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung, 24 September 1962. Alumnus Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, tahun 1987 <b>Perjalanan karir:</b> Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Mandiri Komisaris Utama PT Wahana Optima Permai Regional Manager VIII-Surabaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nama	Riwayat Hidup Singkat
Kusman Yandi <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia. Lahir di Dumai 1 Mei 1965. Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Riau. <b>Perjalanan karir:</b> Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Mandiri Commercial and Business Banking Directorate Executive Business Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Commercial Banking Center Manager/Vice President

3. Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Selama tahun 2016, Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Agus Sudiarto</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
<b>Agus Dwi Handaya</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
<b>Fahmi Ridho</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
<b>Putu Rahwidhiyasa</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
<b>Choirul Anwar</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
<b>Edwin Dwidjanto</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
<b>Kusman Yandi</b>	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

4. Kepemilikan Saham

Selama tahun 2016, Direksi tidak memiliki saham di PT Bank Syariah Mandiri, di Bank Lain dan di Perusahaan lain. Anggota berasal dari Direksi pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan afiliasi BSM dan atau Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Jabatan	Saham di BSM	Saham di Bank lain	Saham di Perusahaan Lain
<b>Agus Sudiarto</b>	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Agus Dwi Handaya</b>	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Fahmi Ridho</b>	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Putu Rahwidhiyasa</b>	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Saham di BSM	Saham di Bank lain	Saham di Perusahaan Lain
<b>Choirul Anwar</b>	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Edwin Dwidjajanto</b>	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Kusman Yandi</b>	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

5. Rangkap Jabatan anggota Direksi pada perusahaan atau lembaga lain  
Direksi BSM tidak ada yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

### VIII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.

1. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM

No	Nama	Riwayat
1	Profil Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, MA Ketua	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Magelang, 18 Oktober 1953</p> <p><u>Pengalaman Pekerjaan</u> Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, periode 2006-2010 dan periode 2010-2014,</li> <li>Pendiri Sekolah Madania-Kahuripan Bogor,</li> <li>Ketua Panwaslu (2003-2004),</li> <li>Direktur SPS UIN Jakarta (2005),</li> <li>Anggota Staff Ahli BNPT (2010-sekarang),</li> <li>Anggota Dewan Riset Nasional (BRN) Menristek RI,</li> <li>Aktif menulis beberapa buku,</li> <li>Aktif sebagai pengurus di beberapa LSM terutama bidang pendidikan dan dialog antar umat beragama, dll.</li> </ol> <p><u>Pendidikan dan Pelatihan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1981.</li> <li>Gelar Magister dan PhD di bidang Philosophy diperolehnya dari <i>Midle East Technical University (METU)</i> Ankara, Turkey tahun 1995.</li> <li><i>Post-Doctorate Research Program</i> di McGill University, Canada (satu semester, 1995) dan</li> </ol>

No	Nama	Riwayat
		<p>d. <i>Post-Doctorate Research Program</i> di Hartford Seminary Connecticut, USA (satu semester, 1997)</p> <p><u>Dasar Pengangkatan Pertama kali:</u> Akta No. 19, tanggal 28 Juni 2011 dan SK Kom No. 13/001-KEP/KOM, tanggal 22 Desember 2011 untuk periode 22 Desember 2011 – Juni 2016</p> <p><u>Pengunduran Diri</u> Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua DPS tanggal 21 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri.</p>
2	Profil DR. K.H. Ma'ruf Amin H.C. Ketua	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, 11 Maret 1943</p> <p><u>Pengalaman Pekerjaan</u> Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BSM (dalam proses persetujuan OJK), <u>Beliau pernah menjabat sebagai:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – 2014)</li> <li>Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009)</li> <li>Ra'ls 'Aam PBNU 2015-2020</li> <li>Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI 2015</li> <li>Anggota BAZIS DKI Jakarta</li> <li>Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta</li> <li>Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta</li> <li>Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta</li> <li>Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama)</li> <li>Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</li> <li>Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</li> </ol> <p><u>Pendidikan dan Pelatihan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang</li> <li>Universitas Ibnu Khaldun Bogor</li> </ol> <p><u>Dasar Pengangkatan Pertama kali:</u> Akta No. 19, tanggal 28 Juni 2011 dan SK Kom No. 13/001-KEP/KOM, tanggal 22 Desember 2011 untuk periode 22 Desember 2011 – Juni 2016</p> <p>Surat persetujuan OJK: Nomor SR-6/PB.13/2017 tgl. 03 Maret 2017 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri.</p>
3	Profil Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967</p> <p><u>Pengalaman Kerja</u> Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia,</li> </ol>

No	Nama	Riwayat
		<p>b. Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI,</p> <p>c. Rektor Tazkia University College of Islamic Economics,</p> <p>d. Beliau juga pernah bertugas sebagai <i>Global Shariah Advisor</i> di Dubai,</p> <p>e. Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia.</p> <p>f. Pada tahun 2010 diangkat Presiden RI sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional, dan</p> <p>g. Pada tahun 2016 diamanahi menjadi Komite Ekonomi dan Industri Nasional.</p> <p><u>Pendidikan dan Pelatihan</u></p> <p>a. Meraih gelar PhD di bidang <i>Micro Finance</i>, dari University of Melbourne Australia tahun 2004.</p> <p>b. Gelar Master di bidang Ekonomi International Islamic University (IIU) Malaysia tahun 1992.</p> <p>c. S1 dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam da ri University of Jordan.</p> <p>d. Beliau menulis 35 buku dalam bidang keuangan, perbankan, leadership dan manajemen.</p> <p><u>Dasar Pengangkatan:</u>                      Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2001                      Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008                      Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011                      Akta No. 07 tanggal 5 April 2016</p>
4	Profil Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Mei 1967</p> <p>Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau menjabat sebagai:</p> <p>a. Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI,</p> <p>b. Dosen S-2 Program PSTTI Universitas Indonesia,</p> <p>c. Dosen S-2 Program IEF Universitas Trisakti,</p> <p>d. Di samping itu aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam,</p> <p>e. Penulis Buku,</p> <p>f. Juga Ketua Umum Al- Washiyah Foundation.</p> <p><u>Pendidikan dan Pelatihan</u></p> <p>a. Lulus dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta tahun 1991,</p> <p>b. S-2 MBA dari IPWI Jakarta</p> <p>c. S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law &amp; Legal Management (IBLAM) Jakarta tahun 2003.</p> <p>d. S-3 di bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 2014.</p> <p><u>Dasar Pengangkatan Pertama kali:</u>                      Akta No. 24, tanggal 8 September 1999,                      Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008,                      Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011.                      Akta No. 07 tanggal 5 April 2016</p>

2. Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.

No	Nama	Rangkap Jabatan
1	DR. K.H. Ma'ruf Amin H.C.	a. Ketua DPS BSM (perbankan) b. Ketua DPS BMI (perbankan) c. Ketua DPS BNI Syariah (perbankan) d. Ketua DPS Mega Syariah (perbankan) e. Ketua DPS BNI Life (asuransi)
2	Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	a. Pimpinan STEI Tazkia (konsultan & pendidikan) b. Anggota DPS BSM (perbankan) c. Anggota DPS Schroders Investment Management
3	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	a. Anggota DPS BSM (perbankan) b. Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi) c. Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi) d. Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan)

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

- a. Pada tahun 2016 DPS melaksanakan 12 kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh DPS, seperti tersaji pada table di bawah ini:

Rapat		Anggota Dewan Pengawas Syariah		
		Dr. KH. Ma'ruf Amin*)	Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	12	-	9	12

\*)Pada Tahun 2016 masih dalam proses persetujuan OJK.

Adapun agenda yang dibahas pada beberapa kali penyelenggaraan rapat selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Lanjutan Pembahasan Pengenaan Marjin Sebesar Dua Bulan Marjin Berjalan (N+2) Dalam Pembiayaan Murabahah Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo (Pelunasan Dipercepat).
- 2) Talangan Umrah Berbasis Fee Based Income
- 3) Penuangan *Alternate Currency Clause* Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Yang Menggunakan Mata Uang Asing (USD)
- 4) Tinjauan pengenaan biaya ijarah proporsional setelah tanggal jual jaminan.
- 5) Pembiayaan linkage program kepada koperasi konvensional.
- 6) Pembiayaan kemitraan inti plasma.
- 7) Penjualan BSM Oto melalui pola kerja sama servicing bersama PT Mandiri Tunas Finance.

- 8) Pengelolaan Dana Investasi BSM Bersumber Dari Tax Amnesty.
  - 9) Produk Supply Chain Financing
  - 10) Pembahasan Hasil Exit Meeting OJK mengenai Selldown.
  - 11) Klausul bagi hasil Sukuk.
  - 12) Penggunaan Asuransi Konvensional untuk nasabah Persada Lines
- b. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS, mulai pada tahun 2017 DPS akan memanfaatkan teknologi telekonferensi/*video conference* sebagai proses pengumpulan data maupun percepatan transformasi informasi dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
- Sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:
- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Pada beberapa kali pelaksanaan uji petik, DPS BSM melakukan koordinasi dengan unit kerja Internal Audit dan *Compliance* untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS sudah memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat pelaksanaan uji petik.
  - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS BSM melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.
  - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS BSM adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia *compliance*. Antara lain;
    - 1) kesesuaian akad yang digunakan,
    - 2) terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
    - 3) pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), akad dan akta notaris.
  - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
  - e. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;
  - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BSM dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan BSM oleh KAP.

- g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran. Yang memuat, antara lain:
- 1) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, review system dan prosedur produk baru.
  - 2) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap SOP terkait aspek Syariah.
  - 3) Opini Umum DPS terhadap operasional Bank per periode. Periode I yaitu 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016 dan periode II yaitu 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016.
  - 4) Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2016 DPS telah mengeluarkan 12 Opini Syariah, dengan rincian pada semester I sebanyak 5 opini Syariah dan semester II sebanyak 7 opini Syariah. Diantara Opini yang dikeluarkan DPS adalah mengenai:
    - (1) Produk dan Operasional BSM Tahun 2015.
    - (2) Fasilitas Perpanjangan Otomatis Bagi Nasabah Gadai BSM.
    - (3) Pengenaan Marjin N+2 Untuk Pelunasan Dipercepat Pembiayaan Murabahah.
    - (4) Talangan Umrah Berbasis Fee Based Income.
    - (5) Laporan Keuangan Audit Per 1 Jan sd 31 Maret 2016.
    - (6) Pengelolaan Dana Investasi BSM Bersumber Dari Tax Amnesty.
    - (7) Refinancing Syariah untuk Keperluan Take Over.
    - (8) Pelaksanaan Asset Sales atau Sell Down dari Mandiri Goup.
    - (9) Talangan Umrah Dengan Menggunakan Akad Al Qardh dan Al Ijarah.
    - (10) Penggunaan Jasa Asuransi Konvensional Untuk PT Persada Lines.
    - (11) Produk Supply Chain Financing.
    - (12) Penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah BSM Tahun 2016
  - 5) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan  
Pada tahun 2016 DPS telah melakukan uji petik/pengawasan langsung ke 4 Kantor Cabang dan 5 (lima) kantor area BSM yaitu:
    - (1) Area Denpasar,
    - (2) Area Banda Aceh,
    - (3) Area Malang,
    - (4) Area Balikpapan,
    - (5) Area Cirebon,
    - (6) KC Tasik,
    - (7) KC Garut (2x) dan
    - (8) KC Subang.

Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan basis akad:

- (1) Murabahah.
- (2) Mudharabah.
- (3) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah.
- (4) Ijarah.
- (5) Kasus Take Over
- (6) Kasus Refinancing
- (7) Pembiayaan kepada koperasi

Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit & Anti Fraud Group (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik.

#### h. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah

Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS BSM melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada staf cabang, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.

Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat cabang memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi.

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat dan pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank Syariah Mandiri, terlebih Bank Syariah Mandiri memiliki Corplan 2016-2020, yang diperkuat dengan internalisasi budaya PAS (Percaya Diri, Antusias dan Semangat), *insya Allah* Bank Syariah Mandiri menjadi bank “Terdepan, Modern. Menentramkan”.

## IX. KOMITE KOMITE

### 1. Komite Audit

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dengan mengacu kepada Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24

September 2004, Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri telah membentuk Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 1 April 2005.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan diubah terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain telah pula mengatur kegiatan Komite Audit. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri.

Pembentukan Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri dilengkapi dengan pengesahan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Mei 2005 yang menjadi pedoman utama dan acuan pelaksanaan kerja bagi para anggota Komite Audit, yang mana telah diperbaharui pada tanggal 08 Februari 2011, dan terakhir diperbaharui tanggal 4 Desember 2014 dan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.17/001-SKB/KOM.DIR tanggal 09 Maret 2015 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) Komite Audit, sebagai acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*Internal Control System*), efektivitas pemeriksaan oleh intern dan ekstern *auditor*, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit, dengan ini disampaikan Laporan Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

a. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Audit dimaksud, selama Tahun 2016 Komite Audit telah secara proaktif menyelenggarakan rapat-rapat Komite Audit dengan berbagai tema pembahasan terkait

kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian *on site*/observasi ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang, serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Pemantau Risiko dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi.

Sesuai *Charter* Komite Audit yang disusun dengan mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern (*internal control system*) termasuk kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:

- a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/unit audit intern.
- b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, *Auditor* intern dan/atau *Auditor* ekstern.

- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai *best practices* dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 3) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

c. Susunan dan Riwayat Hidup Anggota Komite Audit

Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang oleh Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai Ketua), 1 orang anggota dijabat oleh Komisaris, dan 3 (tiga) orang anggota berasal dari pihak independen di luar bank, dengan susunan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan
<b>Zulkifli Djaelani</b> Ketua, Komisaris Independen	Ada pada bagian Dewan Komisaris
<b>Ventje Rahardjo</b> Anggota, Komisaris Utama	Ada pada bagian Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Ramzi A. Zuhdi Anggota, Komisaris Independen	Ada pada bagian Dewan Komisaris
<b>Bambang Widiyanto</b> Anggota, Komisaris Independen	Ada pada bagian Dewan Komisaris
<b>Tjeppy Kustiwa</b> Anggota, Pihak Independen yang ahli dibidang perbankan syariah (01 Januari 2016 - 30 Juni 2016)	Lahir di Bandung, Jawa Barat, 17 Desember 1957. Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1985 dan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjahmada Yogyakarta tahun 1994. Berpengalaman dalam bidang Akuntansi Perbankan (Konvensional dan Syariah), Teknologi Informasi, Pendokumentasian <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) sesuai ketentuan <i>Sarbanes Oxley Act</i> 404, Jasa Konsultasi bidang Akuntansi, Jasa Konsultasi bidang Internal Audit. Telah mengikuti berbagai <i>training / seminar / studi banding</i> di dalam negeri dan luar negeri antara lain <i>training / seminar</i> dalam bidang perbankan, akuntansi, <i>internal audit</i> , teknologi informasi dan yang berkaitan dengan tugas komite audit serta studi banding dalam pemilihan <i>core banking system</i> bersama Konsultan <i>Booz, Allen &amp; Hamilton</i> pada beberapa bank di Singapura. Memulai karir di Bank Bumi Daya 1986 hingga 2000, kemudian di <i>Prasetio Strategic Consulting – Arthur Andersen, Ernst &amp; Young Advisory Services, Center for Investment and Business Advisory</i> , anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan saat ini sebagai anggota Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri.
<b>Ferry Firmansyah</b> Anggota, Pihak Independen yang ahli dibidang akuntansi keuangan (01 Januari 2016 - 30 Juni 2016)	Lahir di Jakarta 29 April 1955 lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi Jakarta tahun 1983. Berpengalaman mengikuti pelatihan di luar negeri antara lain di <i>National Institute of Bank Management, Pune India, Merrill Lynch New Jersey</i> Amerika dan berbagai <i>training / seminar</i> didalam negeri antara lain dibidang yang berkaitan dengan tugas Komite Audit seperti <i>Prime Bank Instrument Frauds, Workshop Treasury, Strategy for Excellent Customer Service, Market Analysis /Strategy Marketing and Product Development</i> . Memulai karier di PT 3M Indonesia sebagai <i>Senior Cost Accountant</i> , Anggota Tim Debitur Khusus Bapindo Pusat Jakarta, Kepala Tim Kredit Bapindo Samarinda, Kabag Keuangan Bapindo Surabaya dan Bapindo S Parman Jakarta Pusat, Kepala Cabang Bapindo Tarakan Kalimantan Timur, <i>Senior Manager Marketing &amp; Regional Internal Control</i> Bank Mandiri (Persero) Tbk Kanwil IV Jakarta Pusat dan sampai dengan 30 Juni 2016 menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri.
<b>Irsyaf Firdaus*)</b> Anggota, Pihak Independen (01 Januari 2016 - 30 Juni 2016)	Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, 16 Agustus 19953 (umur 62 tahun). Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Trisakti, Jakarta pada 1980 dan Magister Manajemen STIE-IPWI Jakarta pada 2000. Memulai karir di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada 1982 sebagai <i>staff</i> Urusan Riset Kantor Besar, selanjutnya 1985-1989 sebagai

Nama	Jabatan
	<p>anggota Tim Urusan Pembiayaan Proyek II Kantor Besar, 1989-1991 Kepala Tim Supervisi Kredit Cabang Samarinda, 1991-1992 Kepala Tim Pembiayaan Proyek Cabang Balikpapan, 1992-1996 Kepala Tim Pembiayaan Proyek Jakarta S. Parman, 1996-1997 Kepala Tim Urusan Kredit Besar di Kantor Besar, 1997-1999 Kepala Cabang Makassar, 1999-2000 Kepala Cabang Bandung Soekarno Hatta.</p> <p>Dalam perjalanan karir di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Bandung Soekarno Hatta, Kepala Cabang Jakarta Tanjung Duren, Kepala Cabang Jakarta Cibubur.</p> <p>Training yang pernah diikuti selama berkarir di Bapindo, antara lain : <i>Project Financing</i>, <i>Akuntansi, Pemeriksaan dan Analisa Laporan Keuangan</i>, <i>Supervisi Proyek Masa Implementasi</i>, <i>Management Development Program-ABC Manila</i>, <i>Financial Rehabilitation of Non Performing-Export Oriented Enterprises</i>, <i>Corporate Finance &amp; Loan Syndication</i>, <i>Pimpinan Cabang Angkatan XVI-1997</i></p> <p>Training yang pernah diikuti selama berkarir di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, antara lain : <i>Selling Commercial &amp; Corporate Bank Services</i>, <i>The Importance of Customer Retention</i>, <i>Marketing Analysis, Strategic Marketing and Product Development</i>, <i>Train the Trainers Branch Operation</i>, <i>Negotiation Skill In Business</i>.</p> <p>Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. Bank Syariah Mandiri sejak 2 Februari 2015 sampai dengan 30 Juni 2016.</p>
<b>Ichwan Rochmanu, Anggota*)</b>	<p>Lahir di Trenggalek, Jawa Timur tanggal 25 April 1959. Pendidikan : Fakultas Hukum (S-1, Jurusan Hukum Perdata), Universitas Jayabaya Jakarta (Tahun 1980 s/d 1985), Magister Manajemen (S-2, Jurusan Manajemen Keuangan) STIE IPWI Jakarta (Tahun 1997 s/d 1998). Sertifikasi yang dimiliki : <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>, <i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>, <i>Manajemen Risiko (BSMR Level 3)</i>, <i>Sertifikasi Kompetensi Auditor (Level Audit Manager)</i> dan <i>Sertifikasi sebagai Assessor Profesi Auditor Perbankan</i>. Pengalaman kerja : Tahun 1980 s/d 1999 sebagai Pegawai Bank Dagang Negara, dengan penjelasan : Tahun 1980-1990 sebagai Pegawai Operasional Cabang Jakarta Thamrin, Tahun 1991 s/d 1997 sebagai <i>Internal Auditor</i>, Tahun 1997 s/d 1999 sebagai Kepala Bagian Audit Mutu Internal. Tahun 1999 s/d 2015 sebagai Pegawai Bank Mandiri, dengan penjelasan : Tahun 1999 s/d 2005 sebagai <i>Investigator</i>, Tahun 2006 s/d 2007 sebagai <i>Department Head General Audit</i> dan Tahun 2008 s/d 2015 sebagai <i>Department Head Special Audit/Investigation Department</i>. <i>Training dan workshop</i> yang pernah diikuti, antara lain: <i>Risk Based Auditing</i>, <i>Investigative &amp; Forensic Audit</i>, <i>Problem Solving &amp; Decision Making</i>, <i>Fraud Prevention &amp; Investigation</i>, <i>Risk Assessment in Credit Transaction</i>, <i>Creative Problem Solving</i>, <i>Effective Communication With NLP</i>, <i>Internal Auditor Role for Basel II Compliance</i>, <i>Great Leader Program</i>, <i>Building High Engagement Workplace</i>, <i>Coaching for Excellence</i>, <i>Targeted Selection</i>, <i>Building Professionalism In You</i> dan</p>

Nama	Jabatan
	Kompetensi Asesor Profesi <i>Auditor</i> Perbankan, dll. Sejak tanggal 1 Juli 2016 sebagai Anggota Komite Audit Bank Syariah Mandiri.
<b>Djoko Seno Adji, Anggota *)</b>	Lahir di Bogor, Jawa Barat, 27 Mei 1959. Pendidikan: Akademi Akuntansi Indonesia Jakarta (D3), Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (S1 - <i>Extention</i> ). Sertifikasi yang dimiliki: <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA), Sertifikasi Kompetensi Level I pada Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Sertifikasi Kompetensi <i>Auditor</i> ( <i>Level Senior Auditor</i> ). Pengalaman kerja: Pegawai Bank Exim Cabang Jakarta Gambir (1981-1988), <i>Internal Auditor</i> Bank Exim (1989-1999), <i>Internal Auditor</i> Bank Mandiri (2000-2015). <i>Training/ workshop</i> yang pernah diikuti, antara lain: <i>Technical Skill Computer Audit, Managing Credit Administration, Training KYC – AML &amp; Auditing, Corporate Banking for Internal Audit</i> , Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit, Simposium Nasional Akuntansi Tahun 2014, <i>Fraud Investigation</i> , dll. Sejak tanggal 1 Juli 2016 sebagai Anggota Komite Audit Bank Syariah Mandiri.

\*)Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 1 Juli 2016, menggantikan Sdr. Tjeppy Kustiwa, Sdr. Ferry Firmansyah, dan Sdr. Irsyaf Firdaus sebagaimana ditetapkan dengan SK Direksi No.18/896-KEP/DIR tgl. 18 Agustus 2016 perihal Penetapan Susunan Keanggotaan Komite-Komite PT Bank Syariah Mandiri.

d. Rangkap Jabatan Anggota Komite

- 1) Tidak terdapat anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai Direksi BSM.
- 2) Ketua Komite Audit merangkap sebagai Anggota pada Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

e. Laporan Kerja Komite Audit

Selama Tahun 2016, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun Telaah Rencana Bisnis Bank PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018.
- 2) Melakukan *Review* atas Laporan Realisasi Audit dan *Top Letters* dari *Internal Audit Group* (IAG).
- 3) Sejak bulan Januari s/d Desember 2016 telah dibuat 10 Laporan Hasil *Review* Realisasi Audit dan *Top Letters* dari IAG.
- 4) Melakukan *Review* atas Laporan Perkembangan Transformasi CBS dari *IT Group* secara bulanan.  
Sejak bulan Januari s/d Desember 2016 telah dibuat 11 Laporan Hasil *Review Progress Report Project Transformasi* CBS dari *IT Group*.
- 5) Melakukan *Review* atas Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri.

Telah dilakukan *review* atas Laporan Keuangan Publikasi BSM periode: Desember/Triwulan IV 2015, Maret/Triwulan I 2016, Juni/Triwulan II 2016 dan September/Triwulan III 2016.

- 6) Menyusun Telaah Laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri. Sejak bulan Januari s/d Desember 2016 telah dibuat 6 (enam) Laporan Pos-Pos Tertentu.
- 7) Kajian *On Site* / Observasi ke Cabang-Cabang. Pada bulan Oktober dan November 2016 telah dilakukan Kajian *On Site*/Observasi ke 2 (dua) Area BSM, yaitu Area Padang dan Area Semarang. Pada setiap kunjungan/observasi dilakukan oleh masing-masing 1 (satu) orang Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dari hasil observasi tersebut dibuatkan Laporan Hasil Observasi yang disampaikan kepada Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko serta Dewan Komisaris.

f. Rapat Komite Audit

- 1) Sejak bulan Januari s/d Desember 2016 telah dilakukan 20 (dua puluh) kali Rapat Komite Audit dengan dibuatkan risalah pada setiap rapat dilakukan dengan agenda sebagai berikut :
  - a) Progres Hasil Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2015.
  - b) Progres Penyelesaian *Suspense Account*.
  - c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada PT Bank Syariah Mandiri.
  - d) *Annual Audit Plan* IAG Tahun 2016.
  - e) Progres Pengembangan Teknologi Informasi.
  - f) Realisasi Audit Intern Tahun 2015 – 2016.
  - g) *Management Letter* Hasil Audit BSM Tahun 2015 oleh KAP PwC.
  - h) Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan BSM per 31 Maret 2016.
  - i) Progres Pengembangan Teknologi Informasi BSM.
  - j) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi.
  - k) Pembahasan Aset BSM di Jl. Saharjo No. 205 A Jakarta.
  - l) Laporan Hasil Audit Intern Periode Juni dan Juli 2016.
  - m) Progres Pengembangan Teknologi Informasi BSM.
  - n) Pembahasan Revisi Charter KPR dan Charter KA (bersama dengan KPR).
  - o) Laporan Hasil Audit Intern Periode Agustus 2016.
  - p) Pembahasan Revisi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern PT BSM.
  - q) Progres Penyelesaian Open Item pada Beberapa Rekening GL Posisi per 30 September 2016.
  - r) End to End Pelaporan Sistem Informasi Debitur.
  - s) Financing Review dan Audit Plan Tahun 2016 oleh KAP.
  - t) Laporan Hasil Audit Intern Periode Oktober 2016.
- 2) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan DPS (Rakomdir/Ragab). Sejak bulan Januari s/d Desember 2016, Komite Audit ikut serta dalam pelaksanaan Rakomdir/ragab sebanyak 12 (dua belas) kali Rakomdir/Ragab bersama dengan KPR, dengan agenda pembahasan Evaluasi kinerja PT Bank Syariah Mandiri per bulan, *Action Plan*, dan Isu-Isu Strategis Lainnya.

- 3) Rapat Komite Pemantau Risiko.  
Sejak bulan Januari s/d Desember 2016, Komite Audit ikut serta dalam pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali Rapat.
- 4) Rapat Komite Remunerasi.  
Dari total 10 agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2016, terdapat keikutsertaan anggota Komite Audit pada 3 (tiga) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan agenda, sbb.:
  - a) Kebijakan *Human Capital*.
  - b) Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 dan Strategi Pemenuhan dan Pengembangan SDM Tahun 2017.
  - c) Progres Penyusunan *Job Desc, Job Grade, Fasilitas*, dsb. Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Transformasi Organisasi.
- 5) Pelatihan Komite Audit.  
Mengikuti Diskusi Panel “Kontribusi Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Mensukseskan Program *Tax Amnesty*”, penyelenggara Ikatan Komite Audit Indonesia, tanggal 31 Agustus 2016 di Jakarta.

## 2. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut Bank Syariah Mandiri) telah membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) KPR, sebagai acuan KPR dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah Mandiri.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPR sebagaimana diatur dalam *Charter* KPR dimaksud, selama periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016, KPR telah secara proaktif menyelenggarakan rapat-rapat KPR dengan berbagai tema pembahasan terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian-kajian (*review*) secara *on desk* atau secara *on site* (observasi) ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang, serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Audit dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko  
Sesuai *Charter* KPR yang disusun dengan mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan tugasnya membantu Dewan

Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah Mandiri, KPR mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1) Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu didiskusikan/dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa penting/*urgent* atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank
- 2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 5) Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko
- 6) Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi

b. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen, 1 orang anggota Komisaris Utama, 1 orang anggota Komisaris Independen dan 2 orang anggota yang berasal dari pihak independen di luar pengurus bank, sebagai berikut:

Nama	Riwayat hidup
<b>Ramzi A Zuhdi</b> Ketua/Komisaris Independen	Ada pada bagian Dewan Komiaris
<b>Ventje Rahardjo</b> Anggota/Komisaris Utama	Ada pada bagian Dewan Komiaris
<b>Zulkifli Djaelani</b> Anggota/Komisaris Independen	Ada pada bagian Dewan Komiaris
<b>Edyanto Rachman</b> Anggota, pihak independen yang ahli di bidang manajemen risiko (1 Januari 2016 – 30 Juni 2016)	Lahir di Cirebon tanggal 27 Maret 1954. Menyelesaikan pendidikan S1 Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978 dan Magister Manajemen Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1991.  Memulai karir sebagai Supervisor pada Parts Department PT Astra Motor Sales tahun 1978. Bergabung dengan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) pada tahun 1984 sebagai staff Urusan Sistem Informasi, selanjutnya sebagai Kepala Tim ALCO <i>Support</i> tahun 1993, Anggota Tim <i>Counterpart</i> Bapindo – Standard Chartered Bank tahun 1994, Wakil Kepala Cabang Bapindo Pontianak tahun 1995 dan terakhir sebagai Kepala Cabang Bapindo Tasikmalaya pada tahun 1997.  Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. pernah

Nama	Riwayat hidup
	<p>menjabat sebagai <i>Team Leader</i> Branch Roll-Out tahun 1999-2000, Group Head MIS - <i>Strategy &amp; Performance Group</i> tahun 2001-2003, <i>Regional Risk Manager</i> Bandung tahun 2004-2006 dan <i>Regional Risk Manager</i> Jakarta Sudirman tahun 2007-2009.</p> <p>Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Wahana Optima Permai (Perusahaan Anak Dana Pensiun Bank Mandiri Empat) pada tahun 2009-2013.</p> <p>Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain <i>Bank Management Course</i> di Stockholm, Boulder Colorado, Cayman Islands, INSEAD Singapore, SESPIBANK Angkatan ke-34, Sertifikasi Manajemen Risiko dan Assesor Kompetensi Manajemen Risiko – LSPP/BNSP.</p> <p>Sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 Juni 2016 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri.</p>
<p><b>Ateng Suhaeni</b> Anggota, pihak independen yang ahli di bidang perbankan syariah (1 Januari 2016 – 30 Juni 2016)</p>	<p>Drs. Ateng Suhaeni, Ak.CA.MM. Lahir di Cirebon 14 Juni 1954, lulus Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung 1983 dan Tahun 1998 lulus Magister Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta.</p> <p>Memulai karir di Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1983 di Cabang Jakarta Kota. Selanjutnya, tahun 1985 - 1989 di Kantor Pusat Urusan Logistik, tahun 1989-1993 di Cabang Denpasar, tahun 1993-1995 di Cabang Bontang dan tahun 1995 - 1998 di Kantor Pusat Urusan Administrasi Keuangan.</p> <p>Tahun 1998 -1999 bergabung dengan Tim Merger Bank Mandiri sebagai Ketua Tim- Koordinator Akuntansi Eks Bank Dagang Negara.</p> <p>Tahun 1999, sebagai Anggota Working Committee Konversi Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Tahun 2000 - 2001 bergabung dengan Divisi Accounting PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Group Head Accounting and Operation Control.</p> <p>Tahun 2001 – 2003 bergabung dengan Divisi Financial Control Project PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Department Head Legacy System &amp; Accounting Support.</p> <p>Tahun 2003 - 2008 bergabung dengan PT Bank Syariah Mandiri, sebagai Kepala Divisi Operasi dan Akuntansi. Tahun 2010 – 2011 sebagai Kepala Divisi Operasi PT Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Branch Management Course, Akuntansi Perbankan, Perpajakan, Ekspor dan Impor, <i>Overview Implementasi Perbankan Syariah</i>, Manajemen Risiko dan Sertifikasi Manajemen Risiko sampai dengan level 4.</p> <p>Tahun 2012 sampai dengan sekarang, Dosen Manajemen Keuangan Syariah dan Corporate Finance di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.</p> <p>Sejak April 2012 sampai dengan 30 Juni 2016, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri.</p>

Nama	Riwayat hidup
<p><b>Hari Dewanto*)</b> Anggota, pihak independen di luar pengurus Bank</p>	<p>Lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 1958. Lulus sebagai Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor tahun 1981, melanjutkan pendidikan di Australia dan memperoleh <i>Post Graduate Diploma</i> dibidang Ekonomi Pertanian tahun 1987 dan memperoleh Master of Economics pada tahun 1988 dari <i>University of New England Australia</i>. Mulai bekerja di PT. Mercubuana sebagai tenaga marketing pada tahun 1981, dan mulai berkarir di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada tahun 1989 sebagai anggota Tim Pembiayaan Proyek II, Divisi Korporasi. Selanjutnya tahun 1992-1995 sebagai anggota Tim Pembiayaan Proyek I, Divisi Bisnis Skala Kecil dan Menengah, Bapindo. Pada tahun 1996-1999, menjadi Kepala Pembiayaan Kredit pada Bapindo Cabang Lampung. Dalam perjalanan karirnya di PT. Bank Mandiri (Persero), tahun 1999-2000 mulai bergabung di PT. Bank Mandiri (Persero), sebagai <i>Senior Officer Risk Management</i>, pada <i>Divisi Retail &amp; Commercial Risk Management</i>. Tahun 2000-2002 ditunjuk sebagai <i>Grup Head Retail &amp; Commercial Risk Management</i> PT. Bank Mandiri (Persero), untuk Wilayah IX (Kalimantan) dan Wilayah X (Sulawesi, Maluku dan Papua). Pada tahun 2002-2005 ditunjuk sebagai <i>Regional Risk Manager, Commercial Risk Group</i>, PT. Bank Mandiri (Persero) untuk Wilayah X (Sulawesi, Maluku dan Papua). Pada tahun 2005-2006 sebagai <i>Vice President, Regional Risk Manager Jakarta III, Commercial Risk Group</i>, PT. Bank Mandiri (Persero). Pada tahun 2006-2014 sebagai <i>Vice President, Department Head, Corporate Risk Group</i>, PT. Bank Mandiri (Persero). Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko, <i>Portofolio &amp; Operational Risk Management, Expertise</i> dibidang <i>Fertilizer, Coal, Palm Oil &amp; Down Stream Industries. Leadership Senior Management Training, INSEAD, Singapore. Project Finance for Developing Countries, The Development Bank of Japan, Tokyo. Corporate Credit Risk Analysis, Standards &amp; Poor's Singapore</i>. Sejak 1 Juli 2016 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Syariah Mandiri.</p>
<p><b>Kayim Hanuri *)</b> Anggota, pihak independen di luar pengurus Bank</p>	<p>Lahir di Cirebon pada tanggal 7 Desember 1958. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982 dan <i>Master of Science in Agricultural Economics</i> dari <i>Texas A&amp;M University, USA</i> pada tahun 1992. Bergabung dengan Bank Bumi Daya (BBD) sejak tahun 1983 dan ditempatkan di BBD Cabang Bandar Lampung dengan berbagai posisi s/d tahun 1989, selanjutnya pada tahun 1990 s/d 1992 memperoleh beasiswa dari BBD untuk meneruskan pendidikan S2 tersebut di atas dan setelah menyelesaikan S2 ditugaskan <i>on the job training</i> di BBD New York Agency. Sejak tahun 1992 s/d 1996 ditugaskan di Kantor Pusat Urusan Korporasi sebagai <i>Senior Account Manager</i>, selanjutnya sebagai Pemimpin Bagian Kredit Sindikasi pada Urusan yang sama sejak tahun 1997 s/d 1998. Pada tahun 1998 ditugaskan sebagai anggota <i>Team Merger Corporate Banking</i> PT. Bank Mandiri (Persero) mewakili BBD. Dalam</p>

Nama	Riwayat hidup
	<p>perjalanan karirnya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai <i>Division Head of Corporate Banking-Structured Finance</i> pada tahun 1999-2000, <i>Division Head of Corporate Banking-Structured Finance, Trade Service &amp; Cash Management</i> pada tahun 2000-2001, <i>Department Head of Syndication and Structured Finance</i> pada tahun 2001-2005, <i>Regional Risk Manager -Wilayah I Medan (Aceh, Sumatera Utara, Batam)</i> pada tahun 2006-2007, <i>Department Head of Credit Policy and Procedure</i> pada tahun 2007-2013, dan <i>Department Head of Business Process &amp; System Reengineering</i> pada tahun 2013-2014. Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain <i>Branch Manager Course-LPPI (1998)</i>, <i>Bank Mandiri Advanced Leadership Course (2001)</i>, <i>Transformation Leadership from Within, Bank Mandiri (2004)</i>, <i>Syndicated Loans, International Faculty of Finance (London, 2004)</i>, <i>INSEAD Leadership Senior Training, INSEAD France (Jakarta, 2004)</i> SESPIBANK-LPPI (2005), <i>Political Risk and Insurance (Shanghai, 2007)</i>, <i>Early Warning Signals: Liquidity and Refinancing Challenges, Fitch Training (Hongkong, 2008)</i>, <i>Credit Risk Masterclass (Singapore, 2009)</i>, <i>Enterprise Risk Management Masterclass (Kuala Lumpur, 2011)</i>, Sertifikasi Manajemen Risiko Level III-LSPP (2010). Sejak 1 Juli 2016 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Syariah Mandiri.</p>

\*)Ditetapkan sebagai anggota KPR sejak tanggal 1 Juli 2016, menggantikan Sdr. Edyanto Rachman dan Sdr. Ateng Suhaeni sebagaimana ditetapkan dengan SK Direksi No.18/896-KEP/DIR tgl. 18 Agustus 2016 perihal Penetapan Susunan Keanggotaan Komite-Komite PT Bank Syariah Mandiri.

c. Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

Selama Tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Kajian (*Review*) on desk

- a) Kajian atas Risiko Kepatuhan terkait terjadinya Perubahan BUKU 2 menjadi BUKU 3 BSM berdasarkan Modal Inti (25.01.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/002-03/KPR/2016 tanggal 2 Februari 2016.
- b) Kajian atas Laporan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) sesuai Profil Risiko BSM Semester II Tahun 2015 (16.02.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/003-03/KPR/2016 tanggal 24 Februari 2016.
- c) Kajian atas PBI No.18/02/PBI/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Transaksi lindung Nilai berdasarkan Prinsip Syariah terkait Risiko Pasar dan Risiko Kepatuhan. (10.03.2016)
- d) Kajian atas Revisi Kebijakan Manajemen Risiko PT BSM. (17.03.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/004-03/KPR/2016 tanggal 24 Maret 2016.

- e) Kajian atas Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank (24.03.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/008-03/KPR/2016 tanggal 30 Maret 2016
  - f) Menyusun telaah Penyampaian Realisasi Audit dan *Top Letter* Audit Periode Januari 2016 dan Realisasi Audit Internal 2015-2016 terkait *Fraud* dan Mitigasi Risiko Operasional (28.04.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/011-03/KPR/2016 tanggal 28 April 2016
  - g) Menyusun telaah *Adjustment* dan *Audit Review Balance* PT BSM per 31 Maret 2016 dan 2015 (12.05.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/012-03/KPR/2016 tanggal 12 Mei 2016
  - h) Antisipasi dan Mitigasi Risiko Pasar Akibat Kewajiban Penggunaan Rupiah dan Penyediaan Dana Valas untuk Memenuhi Permintaan Depag dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji. (21.06.2016). Kajian diteruskan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. 18/013-03/KPR/2016 tanggal 24 Juni 2016
  - i) Kajian (Review) Atas *Charter* Komite Pemantau Risiko PT. Bank Syariah Mandiri 2016 sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, dan PBI No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Hasil Kajian (Review) telah dibahas dalam rapat gabungan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit tanggal 29 Agustus 2016, dengan Risalah Rapat No. 13/016/KA tanggal 29 Agustus 2016. Berdasarkan hasil rapat dimaksud selanjutnya disusun Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko Bank Syariah Mandiri, dan *Charter* tersebut telah diberlakukan sejak tanggal 1 November 2016 sesuai Surat Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris Bank Syariah Mandiri No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016.
  - j) Kajian (Review) Atas Pelaksanaan Risiko Kepatuhan PT. Bank Syariah Mandiri Periode Semester I 2016. Kajian berikut rekomendasinya disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 7 September 2016.
  - k) Kajian (Review) Atas Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BSM Periode Semester I 2016 (*Risk Based Bank Rating*). Kajian berikut rekomendasinya disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 7 September 2016.
- 2) Kajian (Review) *on site* (Observasi ke Cabang-Cabang)
- Telah dilaksanakan observasi ke Cabang-Cabang di Area Padang dan Area Semarang dengan hasil kajian sebagai berikut:
- a) Kajian (Review) Atas Hasil Observasi ke Area Semarang yang dilakukan bersama antara Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai tanggal 4 November 2016. Hasil Kajian (Review) tersebut berikut rekomendasinya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris *vide* Surat No. 18/020-3/KPR tanggal 5 Desember 2016.

b) Kajian (*Review*) Atas Hasil Observasi ke Area Padang yang dilakukan bersama antara Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit pada tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2016. Hasil Kajian (*Review*) tersebut berikut rekomendasinya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris *vide* Surat No. 18/041-3/KA tanggal 7 Desember 2016.

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun. Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali. Di samping itu, Komite Pemantau Risiko juga mengikuti berbagai macam rapat yaitu Rakomdir/Ragab sebanyak 12 (dua belas) kali, Rapat Komite Audit sebanyak 20 (dua puluh) kali, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian jumlah rapat keseluruhan yang dihadiri Komite Pemantau Risiko sebanyak 94 (sembilan puluh empat) kali, dan berikut ini tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat-rapat tersebut di atas.

Nama	Jabatan	Rapat	Hadir	% Hadir
<b>Bp. Ramzi A Zuhdi</b>	Ketua/Komisaris Independen	94	94	100%
<b>Bp. Ventje Rahardjo</b>	Anggota/Komisaris Utama	94	94	100%
<b>Bp. Zulkifli Djaelani</b>	Anggota/Komisaris Independen	94	94	100%
<b>Bp. Hari Dewanto</b>	Anggota	94	*) 93	99%
<b>Bp. Kayim Hanuri</b>	Anggota	94	94	100%

Keterangan: \*) 1 (satu) kali tidak hadir karena dinas luar (DL) ke Padang.

Beberapa agenda rapat Komite Pemantau Risiko antara lain:

- 1) *Financing Operation Center* dan Progress Pengembangan Teknologi Informasi.
- 2) Progress Penataan Jaringan Kantor dan Roll Out BSM.
- 3) Kebijakan Operasional, Kebijakan Tata Perusahaan dan Kebijakan *Treasury* PT BSM.
- 4) *Progress Report* Penataan *Head Office* dan *Distribution Channel*.
- 5) Mikro, Konsumer dan *Pawning*.
- 6) *Wholesale Banking*.
- 7) Implementasi APU dan PPT.

e. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

f. Rangkap Jabatan Anggota Komite

- 1) Tidak terdapat Komite Pemantau Risiko yang merangkap jabatan sebagai Direksi Bank Syariah Mandiri

- 2) Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap sebagai Anggota pada Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi  
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan implementasi *Good Corporate Governance* (vide PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan telah dilakukan pengkinian sebagaimana dimaksud SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri selama tahun 2016.

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;
- 4) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

b. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri telah memenuhi susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahi sumber daya manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016, sbb.:

Nama	Jabatan
Bambang Widianto	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Ventje Rahardjo	Anggota (Komisaris Utama)
Ramzi A. Zuhdi	Anggota (Komisaris Independen)
Agus Fuad	Anggota (Komisaris)
Zulkifli Djaelani	Anggota (Komisaris Independen)
<i>Head of Human Capital Group (Andang Lukitomo, Ex-Officio)</i>	Anggota
Pejabat Bank Mandiri	Perwakilan Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- c. Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 10 (sepuluh) kali Rapat dengan agenda pembahasan dan kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

- 1) Tantiem Tahun 2015, Kenaikan Gaji/Honorarium Tahun 2016, dan Pergantian DPS dan Honorarium DPS.
- 2) Pergantian Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
- 4) Bonus Tahun 2015 bagi Dewan Pengawas Syariah.
- 5) Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris.
- 6) Penunjukkan Sdri. Niken Andonowarih sebagai SEVP.
- 7) Penunjukkan Sdr. Ade Cahyo Nugroho sebagai SEVP.
- 8) Kebijakan Human Capital.
- 9) Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016 dan Strategi Pemenuhan dan Pengembangan SDM Tahun 2017.
- 10) Progres Penyusunan Job Desc, Job Grade, Fasilitas, dsb. Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Transformasi Organisasi.

Tingkat Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

Keterangan	Total Rapat	Ventje Rahardjo	Ramzi A. Zuhdi	Agus Fuad	Bambang Widianto	Zulkifli Djaelani	Andang Lukitomo
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	10	10	10	10	9	10	10

## X. KEPEMILIKAN SAHAM DALAM BANK

Pada tahun 2016 tidak terdapat perubahan struktur modal dari tahun sebelumnya. Komposisi Modal PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Pemilik	Jumlah (ribuan Rp)	Jumlah lembar	Persentase
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.989.021.930,-	397.804.386	99.99999975%
2	PT Mandiri Sekuritas	5,-	1	0.00000025%

## XI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Sebagai wujud komitmen BSM terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka BSM secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG.

Pelaksanaan *self assessment* Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

BSM telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2016 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “sangat baik”. Kesimpulan umum hasil *self assessment* semester I 2016 adalah sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BSM telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang <b>sangat memadai</b> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BSM.

**Analisis**

**A. Identifikasi Permasalahan**

No.	Faktor & Indikator	Kelemahan	Penyebab (Root Cause)
1	<p><u>Faktor:</u> Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</p> <p><u>Indikator:</u> Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</p>	<p>Penyediaan waktu DPS dirasakan masih belum optimal dengan tingkat kehadiran fisik salah satu anggota DPS dalam rapat DPS yang mencapai 47% pada tahun 2015. (<i>vide</i> tanggapan OJK pada bulan Mei 2016 terhadap pelaksanaan GCG BSM tahun 2015)</p>	<p>1. Banyaknya kegiatan anggota DPS sebagai tokoh masyarakat di luar kegiatan rutin BSM, dan</p> <p>2. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak 4 jabatan di luar jabatan BSM</p> <p>Turut mempengaruhi pada penyediaan waktu di BSM utamanya kehadiran fisik pada rapat DPS minimal 1 bulan 1 kali.</p>

**B. Kekuatan Pelaksanaan GCG**

No.	Faktor & Indikator	Faktor Penguat
1	<p><u>Faktor:</u> Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>a) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>b) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>a) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris selama semester I tahun 2016, secara rutin telah melakukan rapat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir) dan Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS (Rapat Gabungan/Ragab), sebanyak 6 (enam) kali;</li> <li>2) Rapat Komite-Komite, sebanyak 46 (empat puluh enam) kali.</li> </ol> <p>b) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi &amp; Nominasi. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diangkat bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>Rapat Komite selama semester I tahun 2016, telah diadakan sebanyak 46 (empat puluh enam) kali yaitu, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Audit, sebanyak 10 (sepuluh) kali.</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko, sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.</li> <li>3) Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 5 (lima) kali.</li> </ol>

No.	Faktor & Indikator	Faktor Penguat
2	<p><u>Faktor:</u> Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>a) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>b) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>a) Direksi memiliki kemauan dan kemampuan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Antara lain dengan mengikuti training-training baik di dalam maupun luar negeri, kegiatan-kegiatan asosiasi atau profesi seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).</p> <p>b) Direksi menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank kepada pegawai melalui SE Bank yang mudah diakses oleh setiap pegawai bank. Juga disampaikan dalam kegiatan Forum Doa Pagi, Raker, RakerWil, Family Gathering, e-Learning atau BSMKnown, dll.</p>
3	<p><u>Faktor:</u> Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>a) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>b) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>a) Rapat Komite selama semester I tahun 2016, telah diadakan sebanyak 46 (empat puluh enam) kali yaitu, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Audit, sebanyak 10 (sepuluh) kali.</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko, sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.</li> <li>3) Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 5 (lima) kali.</li> </ol> <p>b) Dalam pelaksanaan rapat komite, telaah dan/atau kajian yang dilakukan adalah terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank sehingga hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>

Pada semester II 2016 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori “ **sangat baik**”. Secara umum kesimpulan hasil *self assessment* semester II 2016 adalah sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BSM telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang <b>sangat memadai</b> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BSM.

**Analisis**

A. Identifikasi Permasalahan

No.	Faktor & Indikator	Kelemahan	Penyebab (Root Cause)
1	<p><u>Faktor:</u> Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</p> <p><u>Indikator:</u> Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</p>	Penyediaan waktu DPS dirasakan masih belum optimal dengan tingkat kehadiran fisik dalam rapat belum sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan rapat 1 kali tiap bulan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya kegiatan anggota DPS sebagai tokoh masyarakat di luar kegiatan rutin BSM, dan</li> <li>2. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak 4 jabatan di luar jabatan BSM</li> </ol> <p>Turut mempengaruhi pada penyediaan waktu di BSM utamanya kehadiran fisik pada rapat DPS minimal 1 bulan 1 kali.</p>

## B. Kekuatan Pelaksanaan GCG

No.	Faktor & Indikator	Faktor Penguat
1	<p><b>Faktor:</b> Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>a) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>b) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>a) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris selama semester II tahun 2016, secara rutin telah melakukan rapat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir) sebanyak 6 (enam) kali;</li> <li>2) Rapat Komite-Komite, sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali.</li> </ol> <p>b) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi &amp; Nominasi. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diangkat bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>Rapat Komite selama semester II tahun 2016, telah diadakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali yaitu, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Audit, sebanyak 11 (sebelas) kali.</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko, sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali.</li> <li>3) Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 4 (empat) kali.</li> </ol>
2	<p><b>Faktor:</b> Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>a) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>b) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>a) Direksi memiliki kemauan dan kemampuan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Antara lain dengan mengikuti training-training baik di dalam maupun luar negeri, kegiatan-kegiatan asosiasi atau profesi seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).</p> <p>b) Direksi menyampaikan kebijakan-kebijakan Bank kepada pegawai melalui SE Bank yang mudah diakses oleh setiap pegawai bank. Juga disampaikan dalam kegiatan Forum Doa Pagi, Raker, RakerWil, <i>Family Gathering</i>, <i>e-Learning</i> atau BSMKnown, dll.</p>
3	<p><b>Faktor:</b> Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>a) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>b) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>a) Rapat Komite selama semester II tahun 2016, telah diadakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali yaitu, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Audit, sebanyak 11 (sebelas) kali.</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko, sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali.</li> <li>3) Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 4 (empat) kali.</li> </ol> <p>b) Dalam pelaksanaan rapat komite, telaah dan/atau kajian yang dilakukan adalah terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank sehingga hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>

## XII. PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary BSM dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 27 Juni 2016. Dalam SPO tersebut mengatur :

1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki *track record* baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakjikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakjikan/sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
  - a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
  - b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.
2. Pendapatan non halal  
Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
  - a. Dana Kebajikan dari *Penalty*, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.
  - b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
  - c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebakjikan BSM tahun 2016.

Sumber Dana	2016	2015
<b>Sumber dana kebajikan</b>		
Denda	40.167.582.154	73,106,988,372
Sumbangan/hibah	-	-
Penerimaan non-halal	428.227.952	427,346,466
Dana sosial lainnya	80.763.148	203,806,257
<b>Jumlah sumber dana kebajikan</b>	<b>40.676.573.254</b>	<b>73,738,141,095</b>
<b>Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui:</b>		
LAZNAS BSM	36.990.032.769	5,540,160,201
<b>Jumlah penggunaan dana kebajikan</b>	<b>36.990.032.769</b>	<b>5,540,160,201</b>
<b>Keuntungan selisih kurs</b>	(121.101.197)	175,049,850
<b>Kenaikan / (Penurunan) dana kebajikan</b>	3.565.439.288	68,373,030,743

Sumber Dana	2016	2015
Saldo awal dana kebijakan	132.485.913.632	64,112,882,889
Saldo akhir dana kebijakan	136.051.352.920	132,485,913,632

### XIII. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA

#### Penyaluran Dana Sosial Periode Januari-Desember 2016

TGL TRN	TGL VALUTA	KETERANGAN	MUTASI
1/4/2016	1/4/2015	RMBS RNVS MENARA MSJD ALHUDA2407CSG	5.000.000
1/4/2016	1/4/2015	RMBSBNTUANRHLTSSARANA MAN1 2378CSG	15.000.000
1/6/2016	1/6/2016	RMBS BNTUAN SRANA KEG DAKWAH BMT UGT SIDOGIRI 2434CSG	199.140.000
1/6/2016	1/6/2016	RMBS BNTUAN KEND OPR UNIMUS 2429CSG	291.746.500
1/7/2016	1/7/2016	RMBS BELI KURSI TAMAN ALUN2 PEMDA 2432CSG	30.000.000
1/7/2016	1/7/2016	RMBS KEG SOS KEUANGAN SYRH 2433CSG	5.000.000
1/7/2016	1/7/2016	2430CSG 2074 LPJ UM KEG BSM BERBAGI	12.721.826
1/7/2016	1/7/2016	2219CSG 1683LPJUM KEGPLKSN IDULADHA	163.477.000
1/7/2016	1/7/2016	2064CSG 1726 LPJ UM KEG SYKURAN CBT	3.082.000
1/11/2016	1/11/2016	BYR BACKDROP,FRAME ORION,DKRSI,FOTO WALL BSA 009CSG	66.547.500
1/11/2016	1/11/2016	010CSGBYRSOUNDSYSTEM,LIGHTING,GNRTR MULTIMEDIA BSA	59.500.000
1/11/2016	1/11/2016	BNTUAN PPTQ AL WASHIYAH 2438CSG	50.000.000
1/11/2016	1/11/2016	RMBS KEG KHITANAN MASSAL 014CSG	10.000.000
1/11/2016	1/11/2016	RMBS KEG SOS PRBANKN SYRH IAILM PONPES SURYALAYA 2424CSG	20.000.000
1/11/2016	1/11/2016	RMBS BNTUAN SARANA SEKOLAH YASPORBI 008CSG	100.000.000
1/11/2016	1/11/2016	RMBS BNTUAN PRLGKPN PEND UNIV PANCA BUDI 007CSG	4.000.000
1/11/2016	1/11/2016	RMBS KEG KEMAH UKHUWAH JSIT 2437CSG	5.000.000
1/12/2016	1/12/2016	RMBS KEG AKMDS TERKAIT BSA 045CSG	800.001
1/13/2016	1/13/2016	017CSG PLUNASN SEWARUANG,KNSMS BSA	121.249.894
1/15/2016	1/15/2016	BNTUAN DANA PMBGAN SARANA MUSHOLLA BAITUL ROHMAH 026CSG	25.000.000
1/21/2016	1/21/2016	RMBS BAKSOS HAB KEMENAG BDG 087CSG	25.000.000
1/21/2016	1/21/2016	036CSG 2243 LPJ UM BYOPRS THP I BSA	29.184.052
1/21/2016	1/21/2016	RMBS BAKSOS HAB KEMENAG TBLG 051CSG	5.000.000
1/21/2016	1/21/2016	RMBS BELI 1SETSTAND RINGBSKET053CSG	5.000.000
1/21/2016	1/21/2016	077CSG 2405 LPJ UM BYOPRS THP 2 BSA	90.195.506
1/22/2016	1/22/2016	2452CSG RMBSKHATAMANQURAN OKTDES 2	17.461.450
1/22/2016	1/22/2016	078CSG RMBSKHATAMANQURAN NOVDES 3	5.480.000
1/25/2016	1/25/2016	RMBS KEND UTK KEGSOSIAL PEMKAB TOJO UNA-UNA 123CSG	234.700.000
1/25/2016	1/25/2016	RMBS BNTUAN KORBAN KEBAKARAN DESA KANDANG MUKTI LELES 120CSG	5.000.000
1/26/2016	1/26/2016	RMBS BNTUAN UTK PMBRNTSN BUTA QURAN LSM UMMI MAKTUM VOICE 062CSG	50.000.000
1/26/2016	1/26/2016	RMBS BNTUAN RNVSI LAP FUTSAL YAYSN FITYAN SCHOOL 064CSG	25.000.000
1/26/2016	1/26/2016	RMBS BNTUAN DANA KEG IICMA 063CSG MIPA UI	3.000.000
2/2/2016	2/2/2016	RMBS KEG MAULID NABI,SNTUNAN YATIM KARANG TARUNA JAYA KARSA 189CSG	2.500.000
2/3/2016	2/3/2016	RMBS KEG RAPAT PLENO DWAN PERTIMBNG MUI 192CSG	10.000.000
2/4/2016	2/4/2016	RMBS KEG BSM SANTRIPRENEUR 179CSG	1.050.000.000
2/4/2016	2/4/2016	RMBS KEG BAKSOS MHMDYH 195CSG	2.000.000
2/4/2016	2/4/2016	RMBS KHATAMAN QURAN DES15 219CSG	800.000
2/4/2016	2/4/2016	RMBS PMBGAN MUSHOLA FISIPOL UGM 203CSG	400.000.000
2/5/2016	2/5/2016	BNTUAN DANA RNVS MASJID AL-IKHLAS 190CSG	5.000.000
2/5/2016	2/5/2016	RMBS BNTUANMUSHOLA ARRAUDHOH 204CSG	125.000.000

TGL TRN	TGL VALUTA	KETERANGAN	MUTASI
2/5/2016	2/5/2016	RMBS KHITANAN MASSAL YYSDRSLM144CSG	5.000.000
2/5/2016	2/5/2016	RMBS BNTUANMUSHOLABAITUSSYIFA205CSG	650.000.000
2/5/2016	2/5/2016	RMBS BNTUAN PONPESUSHULUDIN 138CSG	7.500.000
2/9/2016	2/9/2016	210CSG LPJ UM BY SYUKURAN BSA	5.099.490
2/11/2016	2/11/2016	BNTUAN MOBIL AMBLNCE UIR 191CSG 003	194.287.500
2/11/2016	2/11/2016	BNTUAN DANA KEG SOSIAL PT SIMTECH 188CSG	10.000.000
2/12/2016	2/12/2016	BNTUAN KEG SOSIAL PAGUYUBAN MASTRIP JATIM 275CSG	40.000.000
2/12/2016	2/12/2016	RMBS BNTUAN DANA KEG SOS,KEAGAMAAN MATARAM 274CSG	5.000.000
2/17/2016	2/17/2016	BNTUAN RNVS MUSHOLA KEMENAG 187CSG	10.000.000
2/17/2016	2/17/2016	BNTUAN RNVS MUSHOLA AL BAROKAH 284CSG	5.000.000
2/23/2016	2/23/2016	BNTUAN RNVS MASJID PB SOEDIRMAN2 285CSG	10.000.000
2/23/2016	2/23/2016	BNTUAN PAVINGISASI MSJD,SKLH YYSN QUANTUM UMAT MULIA 286CSG	5.000.000
3/2/2016	3/2/2016	BY RNVS MASJID ASSUNAHCIREBON331CSG	5.000.000
3/3/2016	3/3/2016	DANA SURVEI,PRSIAPN MUSHOLA TUKTUK SAMOSIR 390CSG	25.000.000
3/16/2016	3/16/2016	RMBS BNTUAN DANA CSR CIRACAS 440CSG	25.000.000
3/16/2016	3/16/2016	RMBS BANTUAN DANA KEG MAULID 439CSG	12.000.000
3/18/2016	3/18/2016	BNTUAN PMBGN GD SATU ATAP PLYNAN HAJI KEMENAG KOTA BDG 431CSG	50.000.000
3/18/2016	3/18/2016	BNTUAN DANA PNGADAN SRNA OLAHRAHA SRGM KTNA KAB OKU 429CSG	50.000.000
3/22/2016	3/22/2016	RMBS BNTUANDANA PGADANPLRTN MOBILER MIN 502CSG	10.000.000
3/23/2016	3/23/2016	RMBS BNTUAN DANA KEG AKNTS PEDULI 2016 HMJA PNJ 503CSG	5.000.000
3/23/2016	3/23/2016	BNTUAN DANA TALIASIH TAD BSM 428CSG	102.000.000
3/30/2016	3/30/2016	BNTUAN RNVS MUSHOLA KEMENAG 513CSG SITUBONDO	10.000.000
4/1/2016	4/1/2016	BYR BNTUAN DANA KEG FEST ISLAMCINTA 566CSG	10.000.000
4/11/2016	4/11/2016	RMBS BNTUAN KEND PEMKAB HULU SUNGAI UTARA 636CSG	321.200.000
4/11/2016	4/11/2016	BY BNTUAN KEG MAULIDNABI JAM'IYATUL KHAIR 635CSG	2.000.000
4/12/2016	4/12/2016	RMBS PMBERIAN BEASISWA PLJR 615CSG	10.000.000
4/20/2016	4/20/2016	RMBS BNTUAN DANA PRBAIKN FSLTS DI MASJID AZ-ZIKRA 547CSG	100.000.000
4/21/2016	4/21/2016	BANTUAN BEASISWA UPI PDG 629CSG	50.000.000
4/21/2016	4/21/2016	RMBS BNTUAN DANA ALQURAN BRAILLE 746CSG	150.000.000
4/21/2016	4/21/2016	RMBS BNTUAN DANA PRLGKPN PNUNJANG OPRS PSTRN AL-ILHAM 745CSG	25.000.000
4/25/2016	4/25/2016	667CSG16 PNGADAAN PNUNJANG MUSHOLLA LANTOR KEMENAG TANGERANG	11.250.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD683CSG1156MBG	250.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD684CSG1157MBG	330.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD687CSG1160MBG	464.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD688CSG1161MBG	475.500
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD680CSG1153MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD682CSG1155MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD685CSG1158MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD686CSG1159MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD689CSG1162MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD690CSG1163MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD692CSG1165MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD693CSG1166MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD733CSG1245MBG	300.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD715CSG1225MBG	499.800
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD694CSG1168MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD695CSG1169MBG	500.000

TGL TRN	TGL VALUTA	KETERANGAN	MUTASI
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD716CSG1226MBG	500.000
4/27/2016	4/27/2016	RMBSKEGGALANGDANAMASJD730CSG1242MBG	500.000
4/28/2016	4/28/2016	RMBS KEG MAULID NABI PONPES DARUL ULUM 668CSG	100.000.000
5/9/2016	5/9/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 721CSG 1231MBG	500.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 725CSG	200.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 697CSG	255.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 679CSG	500.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 681CSG	500.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 720CSG	500.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 722CSG	500.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 723CSG	500.000
5/10/2016	5/10/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 724CSG	500.000
5/11/2016	5/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 691CSG	400.000
5/11/2016	5/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 726CSG	477.000
5/11/2016	5/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 718CSG	500.000
5/11/2016	5/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 697CSG	957.500
5/13/2016	5/13/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 734CSG 1293MBG	494.000
5/13/2016	5/13/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 719CSG 1321MBG	496.200
5/13/2016	5/13/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 727CSG 1317MBG	500.000
5/13/2016	5/13/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 725CSG 1235MBG	500.000
5/20/2016	5/20/2016	BNTUAN TALIASIH TAD BSM THP2 841CSG	33.000.000
5/20/2016	5/20/2016	BNTUAN TALIASIH TAD BSM THP3 873CSG	45.000.000
5/20/2016	5/20/2016	BNTUAN TALIASIH TAD BSM THP4 874CSG	12.000.000
5/23/2016	5/23/2016	BYR BNTUAN DANA POLYTECHNIC SYARIAH FESTIVAL 863CSG	3.000.000
5/24/2016	5/24/2016	RMBS PNGADAN TEMPAT TIDUR PASIEN KELAS III RS SITI KHODIJAH 894CSG	50.000.000
6/2/2016	6/2/2016	BYR KEG SHARIA ECONOMIC WEEK 983CSG	5.000.000
6/3/2016	6/3/2016	BANTUAN DANA PLKSANAN RAMADHAN 1437H 1016CSG	1.187.500.000
6/3/2016	6/3/2016	BNTUAN DANA TALIASIH TAD BSM 992CSG TRMNS	27.000.000
6/8/2016	6/8/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 909CSG	145.000
6/8/2016	6/8/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 902CSG	243.800
6/8/2016	6/8/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 906CSG	481.000
6/8/2016	6/8/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 903CSG	500.000
6/8/2016	6/8/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 908CSG	500.000
6/14/2016	6/14/2016	731CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	294.000
6/14/2016	6/14/2016	729CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	479.000
6/14/2016	6/14/2016	728CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/14/2016	6/14/2016	732CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/15/2016	6/15/2016	KEG SNTUNAN RMDHN YAY MJLS ZIKIR NURUL IMAN 1147CSG	47.500.000
6/22/2016	6/22/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 904CSG	400.000
6/22/2016	6/22/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 907CSG	500.000
6/30/2016	6/30/2016	1062CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	326.000
6/30/2016	6/30/2016	1071CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	480.000
6/30/2016	6/30/2016	1066CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/30/2016	6/30/2016	1067CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/30/2016	6/30/2016	1069CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/30/2016	6/30/2016	1070CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/30/2016	6/30/2016	1073CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	180.000
6/30/2016	6/30/2016	1072CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000
6/30/2016	6/30/2016	1074CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	500.000

TGL TRN	TGL VALUTA	KETERANGAN	MUTASI
6/30/2016	6/30/2016	BNTUANDANATALIASIH THP6 DGS 1184CSG	18.000.000
6/30/2016	6/30/2016	BNTUANDANATALIASIH THP8 CCS 1186CSG	48.000.000
6/30/2016	6/30/2016	BNTUANDANATALIASIH THP7 BSP 1185CSG	57.000.000
7/11/2016	7/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1076CSG	300.000
7/11/2016	7/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1075CSG	500.000
7/11/2016	7/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1064CSG	500.000
7/11/2016	7/11/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1077CSG	500.000
7/19/2016	7/19/2016	BANTUAN KEG BAKSOS IIK BSM DI MEDAN 1197CSG	31.000.000
7/19/2016	7/19/2016	BANTUAN DANA RNVS MUSHOLA PADANG INDAH DENPASAR 1172CSG	11.000.000
7/19/2016	7/19/2016	BANTUAN PRGRM BERSIH MASJID LMBGA TA'MIR MASJID PBNU 1225CSG	21.000.000
7/19/2016	7/19/2016	BANTUAN ASRAMA SANTRI MTS NURUL HIDAYAH NW 1256CSG	22.000.000
7/19/2016	7/19/2016	BANTUAN KEG BAKSOS MILAD ESQ 2016 1198CSG	25.000.000
7/19/2016	7/19/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1068CSG	500.000
7/26/2016	7/26/2016	RMBS BY PNGADAN PRASARANA PNUNJANG DAKWAH AL-FURQON 1148CSG	10.000.000
7/27/2016	7/27/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1064CSG 1745MBG	500.000
8/1/2016	8/1/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1082CSG	1.000.000
8/1/2016	8/1/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1083CSG	500.000
8/1/2016	8/1/2016	TRMN 9 BNTUANTALIASIH PTDGS 1349CSG	15.000.000
8/1/2016	8/1/2016	TRMN10 BNTUANTALIASIH PTCSI 1350CSG	75.000.000
8/1/2016	8/1/2016	TRMN 11 BNTUAN TALIASIH PT PKSS 1351CSG	162.000.000
8/1/2016	8/1/2016	RMBS BANTUAN DANA PNDDKN ANAK YATIM KEMENAG RI 1409CSG	300.000.000
8/2/2016	8/2/2016	RMBSKEGPONPESALFALAH ABULAM1371CSG	2.531.250
8/4/2016	8/4/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1081CSG	258.000
8/4/2016	8/4/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1063CSG	500.000
8/4/2016	8/4/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1078CSG	500.000
8/4/2016	8/4/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1079CSG	500.000
8/4/2016	8/4/2016	RMBS KEG GALANG DANA MASJID 1080CSG	500.000
8/4/2016	8/4/2016	RMBS BANTUAN DANA KEG SOSIAL1366CSG	5.000.000
8/5/2016	8/5/2016	BATUAN TALI ASIH TRMN 12 PT CCS 1352CSG	24.000.000
8/18/2016	8/18/2016	RMBS DANA PMBNGN LAB HALAL UNISMA 1456CSG	109.000.000
8/31/2016	8/31/2016	905CSG RMBS KEG GALANG DANA MASJID	218.000
8/31/2016	8/31/2016	BNTUAN DANA SOS SISTEM AL WASHLIYAH	41.000.000
9/13/2016	9/13/2016	BYR KEG PEKAN AMAL FORKOMMAS 1601CSG INVO27	40.000.000
9/26/2016	9/26/2016	RMBS BANTUAN YAYASAN KHADIRUN YAHYA UNIV PANCA BUDI 1624CSG	336.500.000
9/30/2016	9/30/2016	1780CSG PENCAIRAN DANSOS KE LAZNAS	28.430.000.000
10/11/2016	10/11/2016	RMBS BANTUAN AMBLNC RSU PKU MHMDYH 1740CSG	206.325.000
12/9/2016	12/9/2016	2072CSG RMBS KEG SOSIAL SKKS 2016	75.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>36.990.032.769</b>

#### XIV. REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

##### 1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

- a. remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- b. fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Prosedur penetapan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan *remuneration package* melaksanakan hal berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Dalam penetapan *remuneration package* tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan:

- a. kinerja keuangan;
- b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
- c. kewajaran dengan peer group; dan
- d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.



Pengelolaan reward pegawai terdiri dari komponen reward transaksional dan reward non-transaksional. Reward transaksional merupakan reward tampak yang muncul dari transaksi antara Bank dan pegawai berkenaan dengan penghasilan, baik tetap maupun tidak tetap, dan fasilitas. Sementara reward non-transaksional adalah reward tidak tampak yang berkenaan dengan pembelajaran dan pengembangan serta pembangunan iklim lingkungan kerja.

BSM senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan pola *guaranted cash* yang terus kompetitif di industri maupun *variable income* yang didasari kinerja individu, unit kerja dan Perseroan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lainnya.

Program reward yang bersifat transaksional dikembangkan untuk membuat posisi *Total Guaranteed Cash* tetap kompetitif di industri yang sejenis. Pemberian *variable income* berupa *contest* tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja, namun dapat membentuk perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Program reward yang bersifat non-transaksional memiliki peran yang besar untuk meningkatkan *engagement* pegawai. Sistem manajemen kinerja yang terukur baik maupun berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan pengembangan karir pegawai. Kualitas interaksi kerja serta teladan dari kepemimpinan turut membentuk iklim lingkungan kerja yang kondusif.

Transaksional	
Individual	1. Penghasilan: a. Penghasilan Tetap b. Penghasilan Tidak Tetap
	2. Fasilitas: a. Berlaku untuk seluruh pegawai b. Berdasarkan kriteria
Kommunal	3. Pembelajaran dan Pengembangan: • Pendidikan dan pengembangan di tempat kerja • Pelatihan • Manajemen Kinerja • Pengembangan Karir
	4. Iklim Lingkungan Kerja: • Implementasi share value ETHIC • Program coaching • Kepemimpinan • Aspirasi Pegawai • Manajemen Talenta • Disain pekerjaan dan pengembangan peran • Kualitas interaksi kerja • Keseimbangan kehidupan pribadi dan karir
Non-Transaksional	

2. Remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi**)		DPS***)	
	Orang	jutaan Rupiah	Orang	jutaan Rupiah	Orang	jutaan Rupiah
Remunerasi	5	5.555	7	18.998	4	1.120
Fasilitas lainnya*):						
1. yang dapat dimiliki	5	778	7	1.551		
2. yang tidak dapat dimiliki						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>6.333</b>	<b>7</b>	<b>20.549</b>	<b>4</b>	<b>1.120</b>

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

\*\*) 1 anggota Direksi mengundurkan diri pada bulan September 2016, sesuai RUPSLB tahun 2016.

\*\*\*) Terjadi perubahan Ketua DPS pada bulan April 2016, sesuai RUPS tahun buku 2016.

Keterangan:

- (a) **Remunerasi** yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya;
- (b) **Fasilitas lain** yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

3. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun:

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Diatas Rp2 miliar		7	
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	5		
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar			
Rp500 juta kebawah			4

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Pengungkapan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan:

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	24,2:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,1:1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,1:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2:1

Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

Keterangan:

- a) **Gaji adalah** hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- b) **Pegawai adalah** pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.

#### XV. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGATION

Merujuk pada SEBI No.12/13/DPbS, perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *Buy back shares* dan *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2016 BSM melaksanakan *Call Option Subordinated Notes* BSM Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000.000,- dengan uraian sebagai berikut:

Sukuk Subnotes	Effective Date of Issuance	Maturity Date	Original Currency	Amount in Original Currency
Sukuk Subnotes BSM Tahun 2011 Tahap I Rp75 Milyar	19 Des 2011	19 Des 2021	IDR	75 Miliar
Sukuk Subnotes BSM Tahun 2011 Tahap I Rp275Milyar	19 Des 2011	19 Des 2021	IDR	275 Miliar
Sukuk Subnotes BSM Tahun 2011 Tahap I Rp150Milyar	19 Des 2011	19 Des 2021	IDR	150 Miliar
<b>Total</b>				<b>500 Milyar</b>

## XVI. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

BSM dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan, menjaga Risiko Kepatuhan dan Budaya Kepatuhan berlandaskan pada:

1. PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2. Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 10 September 2015 perihal Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Syariah Mandiri.
3. SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri.

Secara umum, penerapan kepatuhan tahun 2016 terimplementasi dalam setiap kegiatan usaha BSM, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan  
 Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:
  - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
  - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal;
  - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
  - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah;
  - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan a.l.:
    - 1) memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;

- 2) melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
- 3) bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

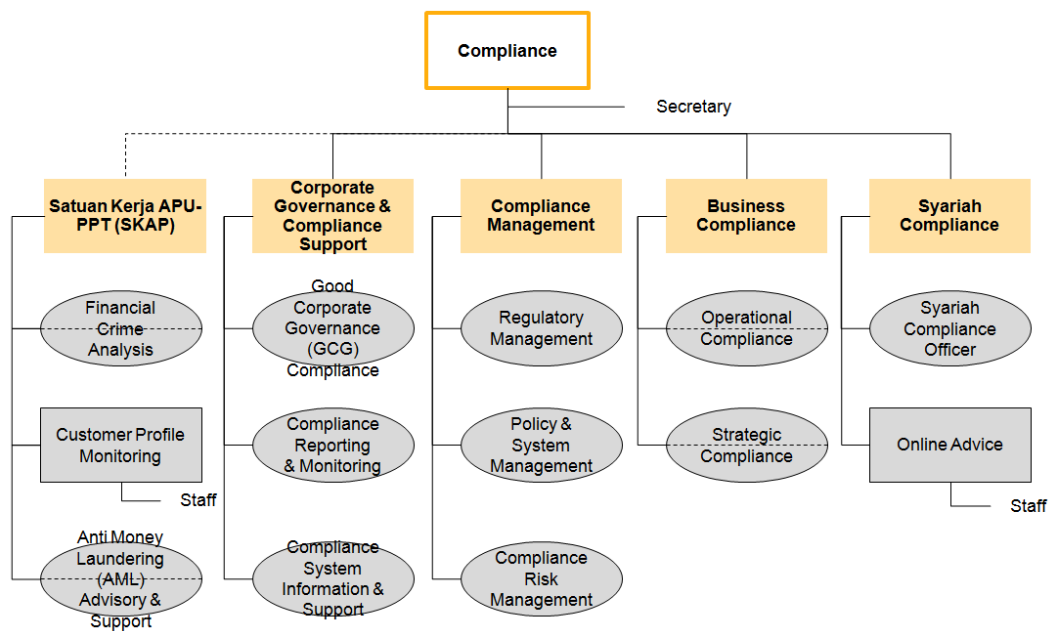
2. Profil Risiko Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bertugas mengelola Risiko Kepatuhan untuk mencegah risiko yang diakibatkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. BSM menjalankan kegiatan usaha diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI).

Pengelolaan Risiko Kepatuhan terkait erat dengan profil Risiko Kepatuhan dimana BSM memiliki risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan BSM selama tahun 2016 adalah **Low to Moderat** (peringkat 2) dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) **Satisfactory** (memadai).

**XVII. SATUAN KERJA KEPATUHAN**

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



a. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

- 1) Efektifitas Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD)

Efektifitas penerapan CDD terhadap nasabah berupa:

- a) Pemantauan profil nasabah melalui kelengkapan data CIF.

- b) Pemantauan profil nasabah pembiayaan melalui pemenuhan *Checklist* APU dan PPT Bidang Pembiayaan.
- c) Pengkinian data nasabah pendanaan.

Efektifitas penerapan EDD berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap nasabah berisiko tinggi untuk kriteria:

- a) Pekerjaan berisiko tinggi (*high risk job*)
- b) Bidang Usaha berisiko tinggi (*high risk business*)
- c) Negara berisiko tinggi (*high risk country*)
- d) Produk berisiko tinggi (*high risk product*)

2) Efektifitas penerapan APU PPT dan profil risiko

- a) Efektifitas penerapan APU PPT BSM didukung oleh peran pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi yang secara berkala melakukan pemantauan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang khusus membahas implementasi APU PPT dan *progress* program APU & PPT yang berjalan di BSM. Peran yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sangat intens memberikan motivasi dan semangat untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam penerapan APU PPT diseluruh jajaran organisasi.
- b) Profil risiko implementasi program APU dan PPT secara periodik bulanan dilaporkan oleh SKAP kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Profil risiko penerapan APU & PPT periode Desember 2016 yaitu “sangat rendah” dengan total nilai sebesar 99.36. Secara keseluruhan predikat implementasi program APU dan PPT Bank “sangat baik” dengan indeks pencapaian “satu”

3) Efektifitas penerapan KYE

Penerapan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan:

- a) Pelaksanaan *screening* penerimaan calon pegawai terhadap profil dan *track record* kemungkinan terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b) Pelaksanaan *screening* terhadap pegawai eksisting pada proses promosi jabatan, yang mencakup beberapa hal, diantaranya:
  - Tidak pernah terkait masalah hukum.
  - Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa.
  - Tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan tersangka/terdakwa.
  - Tidak pernah menerima surat pembinaan dari BSM.

4) Sosialisasi penerapan APU PPT

Pelaksanaan sosialisasi APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank secara kontinyu berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi APU dan PPT melalui program 4DX dan milis kepada PIC SKAP
- b) Pelatihan kepada PIC SKAP dalam hal ini Area Operatioan Service Manager (AOSM), Branch Operation Service Manager (BOSM), Cash Outlet Manager (COM).

- c) Pelatihan APU dan PPT kepada Banking Staff, Priority Banking Officer, Staff Development Program, Officer Development Program..
  - d) Refreshment test APU dan PPT untuk PIC SKAP dan Frontliner.
- 5) Program kerja APU & PPT
- Beberapa program kerja APU & PPT yang dicanangkan pada tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik dalam bentuk aktivitas:
- a) Penguatan skill analisis petugas SKAP Kantor Pusat dengan mengikuti pelatihan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
  - b) Peningkatkan dan penguatan peran, fungsi dan pengetahuan PIC SKAP melalui pelatihan di Regional II dan Regional IV pada bulan Juni 2016 dan implementasi program 4DX.
  - c) Peningkatan sistem pendukung pelaporan APU dan PPT yang terkait dengan pembentukan e-filing, push email data LTKT dan alert sistem screening terhadap profil dan transaksi berisiko tinggi.
- 6) Langkah-langkah penguatan penerapan APU & PPT
- SKAP Kantor Pusat dalam menjalankan tugas telah melakukan sinergi dalam bentuk:
- a) Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan implementasi unit kerja APU & PPT di Kantor Pusat melalui Decentralize Compliance and Operation Risk (DCOR) dan di seluruh Regional Office melalui Regional Business Control (RBC).
  - b) Penetapan PIC SKAP di Kantor Pusat, Regional Office, Area, Branch dan Cash Outlet.
  - c) Penerapan sosialisasi, pelatihan dan training eksternal bagi petugas SKAP dan PIC SKAP yang ada di Regional Office.
- 7) Hal-hal informatif lain terkait penguatan fungsi kepatuhan
- Penguatan fungsi kepatuhan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APU & PPT dilakukan melalui jalur komunikasi SKAP Kantor Pusat dengan seluruh *outlet* melalui media yang dimiliki bank berupa email, lych, telepon. Komunikasi tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan pemberian arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU & PPT agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- b. Corporate Governance and Compliance Support
- Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, diantaranya:
- 1) Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan kepada Direktur Utama
  - 2) Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK
  - 3) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada Bank Mandiri
  - 4) Laporan *self* assessment pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).

- 5) Laporan self assessment pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama (Bank Mandiri).
- 6) Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan kepada stakeholders.
- 7) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan kepada Entitas Utama.

Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:

- 1) Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara *continue* kepada jajaran Bank melalui
  - (a) *Email blast* kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG
  - (b) Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas kelas training.
- 2) pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC
- 3) Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG
- 4) Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
- 5) Melakukan pengukuran Budaya Kepatuhan melalui metodologi survey kepada seluruh jajaran pegawai.
- 6) Melakukan kunjungan klinik GCG ke cabang – cabang berisiko tinggi.
- 7) Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2016 dan pemenuhan Daftar Monitoring Tindak lanjut Kepatuhan.
- 8) Melakukan pengawalan terhadap proses *fit and proper test* Direksi, Dewan Komisaris & Dewan Pengawas Syariah; RUPS dan penyusunan Annual Report.
- 9) Melakukan monitoring dan mitigasi terhadap denda BSM agar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.

c. Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1) Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head;
- 2) Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada BSM, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan;
- 3) Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan terkait Working Group Policy & Procedure (WPP);
- 4) Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam Working Group Policy & Procedure (WPP).

- 5) Melaksanakan pengkinian sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ke Tiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
- 6) Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada bank;
- 7) Memberikan masukan atas pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
- 8) Menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan (Bank Mandiri), dan kepada manajemen Bank dan laporan support lainnya ke Unit Kerja terkait.
- 9) Memastikan terlaksana proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian) Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko.
- 10) Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan monitoringnya;
- 11) Menyampaikan dan memonitoring action plan atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
- 12) Menyusun dan memantau action plan atas ketentuan eksternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada bank.
- 13) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (dotted line) atas Regional Business Control (RBC) dan Decentralize Compliance & Operation Risk (DCOR).
- 15) Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta liaison officer ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

d. Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:

- 1) Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja
- 2) Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja
- 3) Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal
- 4) Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester)
- 5) Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi
- 6) Memastikan pembuatan link layanan one stop financial services terlaksana sesuai timeline.

- 7) Memastikan terlaksananya People Development khususnya aspek syariah.
- Memastikan pelaksanaan Uji Petik DPS berjalan dengan baik
  - Memastikan terlaksananya sharia clinic bagi unit bisnis KP
  - Memastikan tersusunnya Buku Saku Pendanaan (E-Book)
  - Memastikan terlaksananya Pelatihan improvement skill bagi para kepala KCP
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah
- Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2016 antara CPG dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah dilaksanakan diantaranya:

No	Tanggal	Unit Kerja
1	18-19 April 2016	Area Denpasar
2	25-26 Juli 2016	Cabang Tasikmalaya
3	7-9 Agustus 2016	Area Banda Aceh
4	22-23 Agustus 2016	Cabang Garut
5	26-27 September 2016	Cabang Subang
6	16-18 November 2016	Area Malang
7	21-23 November 2016	Area Balikpapan
8	5-6 Desember 2016	Area Cirebon

- Cakupan pengawasan aspek syariah:  
Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
  - Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS diantaranya pembiayaan dengan basis akad:
    - Murabahah
    - Mudharabah
    - Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
    - Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
    - Pembiayaan Take Over, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah
    - Pembiayaan dengan tujuan Refinancing
    - Pembiayaan kepada Koperasi
  - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
- Upaya penguatan pemenuhan aspek Syariah  
Dalam mengupayakan penguatan pemenuhan aspek Syariah, CPG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Sebagai tenaga fasilitator pengajar pada beberapa program academy yang dilaksanakan oleh LCG, diantaranya:
    - (a) Financing Retail Risk Academy
    - (b) Business Banking Academy
    - (c) Pawning Academy
    - (d) Retail Collection & Recovery Academy
  - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
  - Memastikan tersedianya kajian Syariah compliance atas permintaan unit kerja terkait
  - Memastikan tersedianya Opini Dewan Pengawas Syariah atas permintaan unit kerja terkait
  - Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal
  - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah baik dalam usulan manual produk baru maupun perubahannya
- e. Business Compliance
- 1) Pelaksanaan Compliance Review atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:
    - (a) Melakukan pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan *tools Compliance note Independent* (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
    - (b) Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator.
    - (c) Melaksanakan *Compliance on Visit* (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2016, untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
    - (d) Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.
    - (e) Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa *draft* Kebijakan, SE, SOP telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

- 2) Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawasan kepatuhan unit kerja/pengembangan manajemen:
  - (a) Menyelenggarakan Forum Evaluasi *Review* Pembiayaan yang melibatkan *business unit*, *risk assessment unit* dan *support unit* dalam melakukan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir/mencegah non compliance procedure dalam proses pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.
  - (b) Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
  - (c) Melakukan koordinasi dengan DCOR dalam melaksanakan efektifitas pengawasan kepatuhan sesuai peran dan tugas masing-masing.

#### XVIII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Manajemen BSM sangat *concern* terhadap masalah benturan kepentingan. Pada tahun 2016 BSM telah melakukan pengkinian terhadap Pedoman *Code of conduct* (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016. *Code of Conduct* adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. **Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan** yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Sebagai gambaran dalam mencegah munculnya benturan kepentingan dilakukan beberapa upaya secara berkesinambungan, diantaranya melalui :

- a. Poster La risywah, *No Kick Back* dan *No Special Payment*  
Merupakan bentuk komitmen pimpinan yang wajib diikuti jajaran Bank untuk bekerja dengan lurus.

## Nasabah kami Yth.



Kami, Direksi dan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri:

1. **tidak dibolehkan** menerima pemberian atau hadiah, langsung atau tidak langsung, dari nasabah/rekanan atau calon nasabah/rekanan berkenaan dengan tugas kami;
2. **tidak dibolehkan** melayani pengajuan pembiayaan melalui perantara, broker atau pihak ketiga lainnya yang mengenakan fee atau komisi atas beban siapa pun.
3. **tidak dibolehkan** menerima titipan dari nasabah seperti buku tabungan, bilyet deposito, warkat cek/BG, formulir transaksi kosong yang telah ditandatangani dan bukti kepemilikan rekening nasabah lainnya.

Terima kasih atas dukungan Anda kepada kami dalam mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Atas nama Direksi dan Pegawai  
PT Bank Syariah Mandiri



Agus Sudiarto  
President Director

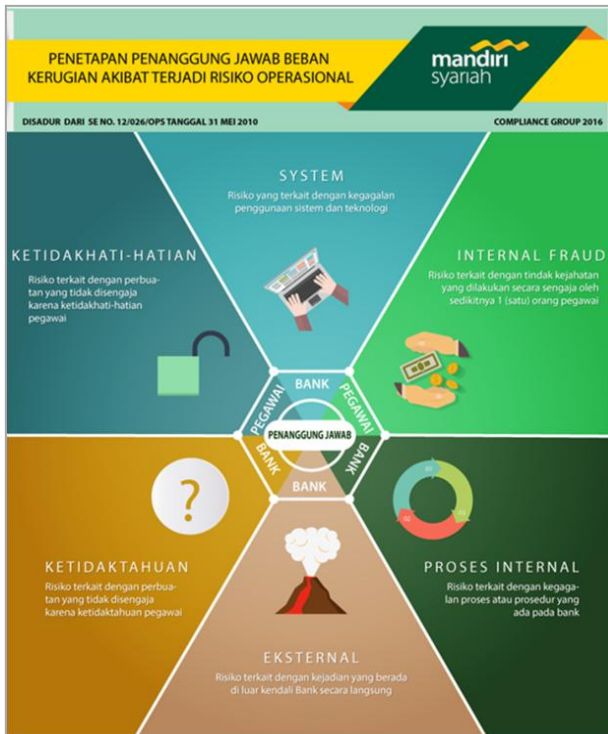
\_\_\_\_\_  
Branch Manager

b. *Email blast*

Bentuk sosialisasi dan *reminder* kepada jajaran Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan

Jajaran BSM diharuskan untuk mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) setiap tahunnya terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.



**mandiri syariah**

**TERIMA BERARTI RISYWAH**  
*Dimana integritasnya?*

Info:  
Compliance Group  
GCG@bsm.co.id  
Telp. 3510840 ext. 4045, 4043, 4021

Sosialisasi Good Corporate Governance #2  
GERAKAN LA RISYWAH, NO KICK BACK, NO SPECIAL PAYMENT

**BSM BERANI**

SKB Direksi dan Komisaris No.4/002/DIR.KOM tentang Code of Conduct  
Seluruh jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya objektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya

Untuk Peradaban Mulia

**XIX.CODE OF CONDUCT**

Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. CoC mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.

Jajaran BSM memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan CoC ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan. Konten CoC BSM terdiri dari:

**1. Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Ruang lingkup terdiri dari:

- a. Jajaran Bank wajib menghindari diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.

- c. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.
2. Larangan Risywah  
Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima *risywah* kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.
3. Kerahasiaan
  - a. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau nasabah yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan Bank.
  - b. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan Bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Penyalahgunaan Jabatan  
Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/memaksa jajaran Bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.
5. Perilaku Insiders  
Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Integritas dan Akurasi Data Bank
  - a. Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
  - b. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.
  - c. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.
7. Pengelolaan Rekening Pegawai  
Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.
8. Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure)  
Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.
9. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan  
Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman *Code of Conduct* sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung

jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap *Code of Conduct* mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.

Optimalnya penerapan CoC menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan Tata Kelola yang baik. Komitmen dan integritas dari masing-masing jajaran Bank untuk mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik cerminan dari upaya dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan Bank yang berkelanjutan.

Manajemen BSM secara konsisten mendorong jajaran Bank untuk menghindari benturan kepentingan. Setiap benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank sudah ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Sebagai salah satu contoh gerakan untuk meminimalisir kondisi benturan kepentingan yang didorong oleh manajemen adalah gerakan *La Risywah, No Kick Back* dan *No Special Payment* yang merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) seluruh jajaran BSM agar senantiasa bekerja dengan lurus dan bertanggung jawab serta obyektif secara profesional.

Selain aturan terkait CoC, BSM juga memiliki aturan terkait larangan pemberian hadiah, souvenir atau cinderamata kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun jajaran Bank lainnya yang sedang melakukan perjalanan dinas atau kunjungan ke unit kerja yang di atur dalam surat Edaran NO.11/033/UMM tanggal 15 Januari 2009 perihal larangan Kepada Unit Kerja Cabang Untuk Memberikan Souvenir/Cinderamata/Oleh-oleh/Hadiah Kepada Anggota Direksi dan/atau Komisaris Bank yang Melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau Kunjungan.

BSM memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

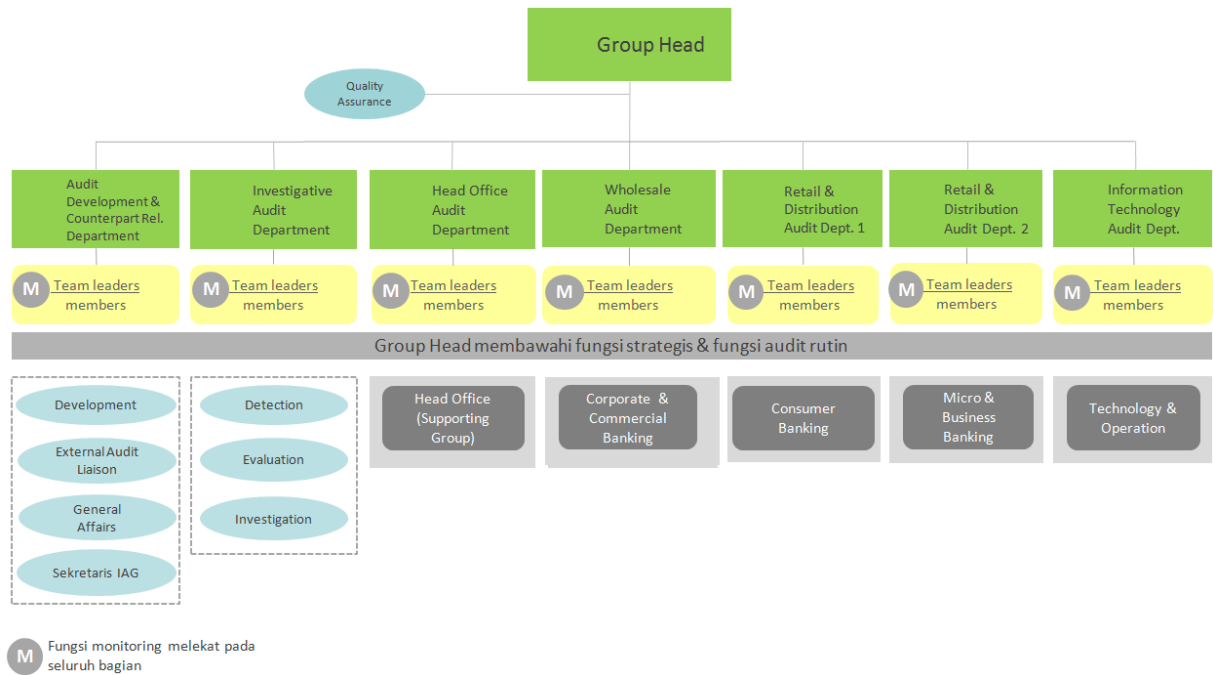
## XX. PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Internal Audit memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan hal ini Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Sebagai *strategic partner*, Internal Audit Group (IAG) berupaya untuk dapat memberikan “*adding value and improving organization’s operations*”, yang tidak hanya membantu *management* untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut berperan mengawal pencapaian target-target Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis lima tahun ke depan.

### 1. Kedudukan dan Organisasi Internal Audit

Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20

September 1999, Unit Kerja Audit Intern secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi berikut:



2. Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit

Pelaksanaan audit menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA), didasari dengan pemilihan *top risk* untuk audit rutin maupun audit tematik. Seluruh perencanaan audit diarahkan untuk dapat mengawal tercapainya Program Kerja dan Prioritas Utama Bank tahun 2016. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, audit terhadap unit kerja tahun 2016 difokuskan pada 4 (empat) area utama yang sejalan dengan strategi bisnis bank, yaitu: Evaluasi Produk, Review Fungsi Pendukung Bisnis, Evaluasi *Branching Strategy* dan Audit Operasional atas *Business Unit*. Pelaksanaan audit secara lengkap sebagai berikut:

a. Audit Rutin

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator (*mandatory* audit), direncanakan secara sistematis di awal tahun berjalan dan penetapan prioritasnya dilakukan melalui proses *risk assessment* yang ditentukan melalui metodologi Risk Based Audit (RBA).

b. Audit Tematik

Merupakan pendekatan audit yang lebih berfokus pada isu-isu yang bersifat strategis dan berdampak secara *bankwide*. Audit tematik dilakukan secara menyeluruh (*end to end*), yang pelaksanaannya dapat melibatkan beberapa unit kerja, baik Kantor Pusat maupun Cabang. Realisasi audit tematik yang dilakukan pada tahun 2015 terdiri dari: Audit Pembiayaan Multifinance, Audit Layanan Priority, Audit *Outlet* Kategori Khusus dan Audit Monitoring Pengelolaan Teknologi Informasi.

c. Audit Khusus

Dilakukan terhadap isu-isu tertentu yang signifikan maupun tindakan penyelewengan atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian terealisasi dengan indikasi kecurangan (*fraudulence*) dan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*, Peraturan Perusahaan, atau Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Realisasi audit selama tahun 2016, meliputi audit rutin, audit tematik dan audit investigatif sebanyak 130 penugasan dari 116 target audit yang ditetapkan (112,07%).

Hasil Audit atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan atas hasil audit dimonitor secara ketat, untuk meyakini bahwa seluruh permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Pada tahun 2016 seluruh temuan hasil audit yang jatuh tempo sd Desember 2016, telah ditindaklanjuti 100%.

3. Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Pengembangan

Dalam menjalankan fungsinya IAG didukung oleh 62 personil dengan rincian pengembangan sebagai berikut:

- a. Auditor bersertifikasi Bankir Nasional – USMR Level I – IV s.d. 2016 sejumlah 48 orang
- b. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional - Level Auditor sejumlah 42 orang
- c. Auditor bersertifikasi Profesi Internasional - Level Auditor sejumlah 3 orang
- d. Aktivitas Pendukung lainnya:
  - 1) **People - Internal Audit Training Plan** yaitu selama tahun 2016, pelatihan/ *workshop* yang diikuti oleh pegawai IAG sebanyak 24 pelatihan/*workshop*.
  - 2) **Technology** - Integrated Fraud Information System (IFIS).
  - 3) **Methodology** yaitu Continuous Auditing dan Fraud Risk Assessment (FRA).
  - 4) **Process - Review Ketentuan (sisdur) selama 2016** terdapat 101 ketentuan yang di-*review* (Ketentuan dimaksud terdiri dari *draft* Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, dan atau Petunjuk Teknis).

4. Jumlah Penyimpangan dan Upaya Penyelesaian oleh BSM

Internal *fraud* adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pengurus maupun pegawai BSM untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan BSM secara signifikan. Selama tahun 2016, jumlah internal fraud yang terjadi adalah sebanyak 25 kasus, dengan *progress* penyelesaian sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris & Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total <i>Fraud</i>	0	0	18	25	8	0
Telah diselesaikan	0	0	11	7	5	0
Dalam proses penyelesaian di internal BSM	0	0	7	18	3	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	3	7	0	0

\* Kasus yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah bagian dari kasus yang telah diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian di internal BSM.

Upaya penyelesaian kejadian *fraud* dilakukan dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, BSM juga mempertimbangkan untuk memproses para pelaku ke jalur hukum. Perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* di unit kerja tempat kejadian juga segera dilakukan agar kasus serupa tidak terulang dimasa mendatang.

## XXI. WHISTLEBLOWING SYSTEM

### 1. Landasan Whistleblowing System

Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur tentang *whistleblowing system* sebagai upaya untuk mendorong pendeteksian secara dini atas setiap tindakan penyimpangan. Beberapa ketentuan yang menjadi landasan penerapan *whistle blowing* di BSM adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 1/61/PBI /1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah;
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
- g. Surat Edaran Umum No. 14/002/UMM, tanggal 22 Mei 2012 perihal Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Mandiri;

- h. Standar Prosedur Pengendalian No. SPP/07-2016, tanggal 30 Desember 2016 perihal Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit.

## 2. Mekanisme Pelaksanaan

Bank melalui Unit Internal Audit wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan dilakukan oleh Pelapor yang berisi informasi awal atas bentuk penyimpangan, pihak yang terlibat, lokasi/unit kerja terjadinya penyimpangan, perkiraan nilai kerugian (jika ada), serta kronologis penyimpangan.
- b. IAG membuka saluran pengaduan dari beberapa sumber (SMS, Whatsapp, BBM, Surat, telepon, Email [pengaduan@bsm.co.id](mailto:pengaduan@bsm.co.id)) atau datang langsung ke IAG untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau fraud.
- c. Unit Kerja Internal Audit menerima informasi dan melakukan analisis awal atas informasi adanya dugaan fraud serta mengumpulkan informasi tambahan berupa bukti tertulis, keterangan tertulis saksi dan pelaku, serta bukti petunjuk lainnya.
- d. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain DCOR/RBC maka Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada DCOR/RBC sesuai lokasi dugaan kasus. Tujuannya agar DCOR/RBC *ter-update* atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya dan menentukan penanganan kasus secara langsung oleh DCOR/RBC atau kolaborasi dengan Unit Kerja Internal Audit.
- e. Unit Kerja Internal Audit menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan fraud. Kesimpulan dapat berupa:
  - Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh Department Special Audit; dan
  - Belum layak investigasi.
- f. Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada pemberi informasi atau Bagian Non Audit Khusus Unit Kerja Internal Audit untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme non-investigasi. Pemberi informasi dapat menyampaikan kembali ke Unit Kerja Internal Audit apabila suatu ketika ada bukti permulaan tambahan.
- g. Apabila sudah layak investigasi, Department Head Special Audit menunjuk Tim Audit untuk menyiapkan preaudit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Unit Kerja Internal Audit atau 2 (dua) Pejabat Alternate Unit Kerja Internal Audit.
- h. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
- i. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
- j. Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah terkumpul.
- k. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi dan *Executive Summary*

### 3. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

Selama tahun 2016, IAG menerima 146 pengaduan, dengan *progress* tindak lanjut penanganan sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	STATUS			
	Done	Tindak Lanjut On Progress (On Desk/On Site)	Perkiraan Belum Layak Ditindaklanjuti	Belum Tindak Lanjut
146	85	25	22	14

## XXII. PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2016

Perkara hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BSM selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Perkara hukum yang dihadapi Bank tahun 2016

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	18	7
Dalam proses penyelesaian	156	27
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>34</b>

Upaya-upaya BSM dalam memitigasi risiko hukum terkait intensitas jumlah perkara hukum yang dihadapi BSM yaitu:

1. Penggunaan jasa external lawyer dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.
2. Sosialisasi legal awareness bidang pembiayaan dan pendanaan melalui training di kantor pusat/kanwil/cabang.
3. Pencadangan potensi kerugian.

**XXIII. DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIEPERSAMAKAN DENGAN ITU**

## 1. Kantor Akuntan Publik

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
2	KAP Syarief Basir & Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
3	KAP Hananta Budianto & Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
4	KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
5	KAP Yanuar & Riza	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
6	KAP Dra. Suhartati & Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
7	KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
8	KAP Pieter, Uways & Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
9	KAP Soejatna, Mulyana & Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
10	KAP Jojo Sunarjo dan Rekan	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik
11	KAP Abdul Aziz Fiby Ariza	Memberikan jasa penilaian terhadap kualitas laporan keuangan baik nasabah/calon nasabah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Akuntan Publik

## 2. Sumber Daya Manusia

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	PT BSDM	Pegawai <i>Outsource</i>	<i>Recruitment</i>
2	Kimia Farma	Laboratorium Test Kesehatan Calon Pegawai	<i>Recruitment</i>
3	Parahita	Laboratorium Test Kesehatan Calon Pegawai	<i>Recruitment</i>
4	Hi-Lab	Laboratorium Test Kesehatan Calon Pegawai	<i>Recruitment</i>
5	Jobs Street Indonesia	Sourcing Kandidat	<i>Recruitment</i>
6	PPM Manajemen	Assessment center MBM	<i>Assessment</i>
7	PT GML	Assessment Center SDP	<i>Assessment</i>
8	PT Hay Group	Assessment center MDP	<i>Assessment</i>
9	Willis Towers Watson	Survei Gaji	<i>Reward Management</i>
10	Dayamandiri Dharmakonsolindo	Aktuaria	<i>Reward Management</i>
11	PT Cipta Busana Jaya	Pembuatan Seragam Wanita	<i>Reward Management</i>
12	PT Citra Polasindo	Pembuatan Seragam Dasar	<i>Reward Management</i>
13	Mandiri Inhealth	Asuransi Kesehatan Pegawai BSM	<i>Reward Management</i>
14	Mandiri DPLK	Lembaga pengelola Iuran Pensiun Pegawai BSM	<i>Operation</i>
15	PT Piranti	Pengelolaan Mesin Absensi	<i>Operation</i>

## 3. Kantor Jasa Penilai Publik

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	KJPP Agus, Firdaus & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
2	KJPP Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
3	KJPP Bambang dan Ernasapta	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
4	KJPP Benedictus Darmapuspita & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
5	KJPP Firman Azis dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
6	KJPP Iskandar dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
7	KJPP Husni, Joediono dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
8	KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
9	KJPP Karmanto & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
10	KJPP Muhammad Adlan & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
11	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
12	KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
13	KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
14	KJPP Rengganis, Hamid & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
15	KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
16	KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (d.h KJPP Chalimatus)	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
17	KJPP Sukardi, Israr & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
18	KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
19	KJPP Tri, Santi dan Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
20	KJPP Yanuar Bey & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
21	KJPP Febriman & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
22	KJPP Syarif & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
23	KJPP Sarwono, Indrastuti	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
24	KJPP Aksa, Nelson & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
25	KJPP Taufik, Baskoro & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
26	KJPP Muhammad Taufik	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik
27	KJPP Ruky Safrudin & Rekan	Memberikan jasa penilaian dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.	Jasa Penilai Publik

## 4. Asuransi

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	PT Asuransi Jiwa Sinar Mas - Cabang Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
2	PT A.J. Central Asia Raya - Cabang Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
3	PT Asuransi Takaful Keluarga	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
4	PT ASURANSI SIMAS JIWA d/h PT MEGA LIFE UNIT SYARIAH	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
5	PT BNI LIFE INSURANCE SYARIAH	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
6	PT AVRIST ASSURANCE	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
7	PT AIA Financial	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
8	PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Jiwa
9	PT Tugu Pratama Indonesia - Divisi Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
10	PT Asuransi Jasindo - Divisi Jasindo Takaful	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
11	PT Asuransi Tri Pakarta - Cabang Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
12	PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 - Unit Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
13	PT Staco Jasapratama - Cabang Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
14	PT Asuransi Adira Dinamika - Divisi Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian	Asuransi Kerugian

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
		sewa menyewa.	
15	PT Asuransi Astra Buana - Unit Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
16	PT Asuransi Ramayana, Tbk - Cabang Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
17	PT Asuransi ASEI Indonesia	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
18	PT Asuransi Sinar Mas- Cabang Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
19	PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI)	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
20	PT Asuransi Bangun Askrida - Divisi Syariah	Memberikan proteksi atas jiwa, agunan nasabah, asset Bank, serta asset pihak ketiga lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan Bank antara lain melalui perjanjian sewa menyewa.	Asuransi Kerugian
21	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Memberikan proteksi atas risiko kredit karena nasabah	Penjaminan

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
		tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah.	
22	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Memberikan proteksi atas risiko kredit karena nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah.	Penjaminan
23	PT Jamkrida Jabar	Memberikan proteksi atas risiko kredit karena nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah.	Penjaminan

## 5. Balai Lelang

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup
1	PT Balai Lelang Harmoni	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
2	PT Kobalindo Balai Lelang	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
3	PT Balai Lelang Star	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
4	PT Balai Mandiri Prasarana	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
5	PT Duta Balai Lelang	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
6	PT Balai Lelang Tunjungan	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk	Balai Lelang

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup
		kepentingan Bank lainnya.	
7	PT Power Asetindo Selaras	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
8	PT Central Asia Balai Lelang	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang
9	PT Balenus Prima Nusantara	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya..	Balai Lelang
10	PT Balai Lelang Casa	Memberikan jasa lelang terhadap agunan-agunan nasabah pembiayaan Bank yang bermasalah atau untuk kepentingan Bank lainnya.	Balai Lelang

## 6. Konsultan/Vendor lainnya

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup
1	Marketing Research Indonesia (MRI)	Mengukur kualitas layanan Cabang	Frontliners dan <i>tangible</i> Kantor Cabang
2	Learning Resources	Konsultan <i>Service Value Development</i>	Seluruh pegawai BSM
3	ACT Consulting	Mengukur kesehatan budaya organisasi di BSM melalui <i>Organizational Culture Health Index (OCHI)</i>	Seluruh pegawai BSM
4	PT Infomedia Nusantara	Pengelolaan <i>Call Center</i>	Pengadaan SDM dan pengadaan fasilitas layanan untuk nasabah
5	PT Prima Karya Sarana Sejahtera	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang
6	PT Cakra Satya Internusa	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang
7	PT Persada	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang
8	PT Cahaya Cipta Selaras	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang
9	PT Duta Griya Sarana	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang
10	PT Garda Tujuh Tiga	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang
11	PT Cahaya Utama	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang

No	Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Tujuan	Ruang Lingkup
12	PT Cyndi Eratama Sejati	Pengelolaan Security	Pengamanan Kantor Pusat Dan Cabang

## **Kantor Pusat**

Wisma Mandiri

Jl. MH.Thamrin No. 5, Jakarta 10340

Telp. (021) 2300 509, 3983 9000 (hunting)

Fax. (021) 3983 2989

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)